



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SEKRETARIAT DPRD



**DAFTAR DOKUMEN MASUKAN-MASUKAN
DARI BERBAGAI PIHAK ATAS PERATURAN DAERAH**

**NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



PIDATO

**PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN ACARA PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM
FRAKSI-FRAKSI TERHADAP
RANPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN 2024
KAMIS, 1 AGUSTUS 2024**

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

**YTH. GUBERNUR SUMATERA BARAT
YTH. WAKIL-WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, PIMPINAN OPD,
DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.**

Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, siang hari ini kita dapat hadir pada Rapat Paripurna Dewan dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Salawat beriring salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli `Ala Muhammad wa `Ala Ali Muhammad.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur, Undangan dan Hadirin semua yang telah berkenan menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada siang hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Hari ini, Kamis tanggal 1 Agustus 2024, dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2024, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami Hormati;

Dalam rangka pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, pada Rapat Paripurna kemaren, Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan secara resmi ke DPRD, Ranperda tentang

Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, untuk dapat dibahas dan disepakati bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Dari Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 yang disampaikan tersebut, secara umum telah sesuai dengan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2024 yang disepakati oleh DPRD dan Gubernur Sumatera Barat, dimana proyeksi pendapatan sebesar Rp. 6.877.451.649.287,- dan belanja daerah sebesar Rp. 7.037.899.193.712,-.

Namun perlu kita cermati bersama, bahwa proyeksi pendapatan dan alokasi belanja yang diusulkan dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 masih bersifat tentatif dan perlu di dalam kembali dalam pembahasan nanti.

Sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda dan APBD, terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 yang disampaikan oleh Gubenur, maka Fraksi-Fraksi akan memberikan Pandangan Umum Fraksinya yang berisikan pandangan, tanggapan, masukan dan saran terhadap Perubahan APBD Tahun 2024 tersebut.

Berkenaan dengan hal dimaksud, tentunya Fraksi-Fraksi telah menyiapkan Pandangan Umum Fraksinya yang akan disampaikan pada Rapat Paripurna ini. Kami berharap, Fraksi-Fraksi dapat melihat secara menyeluruh Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024, baik terhadap pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah, termasuk usulan kegiatan baru yang ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2024. Dan disamping itu, kami juga berharap Fraksi-Fraksi dapat memberikan masukan dan solusi untuk mendorong peningkatan pendapatan serta mengefektifkan penggunaan anggaran yang alokasinya semakin terbatas.

Untuk itu, kepada masing-masing Fraksi, kami persilahkan menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya secara bergantian.

1. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra
2. Ketua atau Juru Bicara Fraksi PKS
3. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat
4. Ketua atau Juru Bicara Fraksi PAN
5. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Partai Golkar

.....
6. Ketua atau Juru Bicara Fraksi PPP dan NasDem
.....

7. Ketua atau Juru Bicara Fraksi PDI-P & PKB.
.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua atau Juru Bicara Fraksiyang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2024.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang Kami Hormati;

Sebagaimana yang kita dengar dan simak bersama, dalam Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, cukup banyak pertanyaan dan tanggapan yang diberikan terkait dengan pendapatan dan belanja daerah yang diusulkan dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024. Sesuai dengan tahapan pembahasan, terhadap pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi tersebut, akan diberikan pula jawabannya oleh Kepala Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami menginformasikan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat

pula menyiapkan jawaban dan/atau tanggapannya terhadap Pandangan Umum yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2024. Sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan, jawaban dan/atau tanggapan Gubernur tersebut akan disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan besok, Jum'at tanggal 2 Agustus 2024.

Kami berharap, jawaban atau tanggapan Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi nanti, dapat menjelaskan dan menjawab secara utuh pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan oleh masing-masing Fraksi, sehingga terbangun persepsi yang sama antara Fraksi-Fraksi dengan Pemerintah Daerah terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Dengan telah disampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2024, maka berakhir pulalah rapat paripurna kita pada hari ini. Sebelum rapat ini ditutup, terlebih dahulu kami

menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya dengan mengucapkan “Alhamdulillahilalamin” rapat paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024, secara resmi kami tutup.

..... (ketukan palu 3 x)

Terima Kasih
Billahitaufiqwalhidayah
Wss.wr.wb



**FRAKSI PDI PERJUANGAN & PKB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Jln. Khatib Sulaiman No.87 Telp. (0751)443391,7059325,7059328 Fax.(0751) 443391 - 7059325 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

**PENDANGAN UMUM
FRAKSI PDI PERJUANGAN DAN PKB
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024**

**Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian**

Merdeka!!!

Yth. Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Yth. Saudara Ketua, Wakil ketua dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Yth. Sdr. Anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat

Yth. Saudara Sekretaris Daerah/Staf Ahli/para Asisten/Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Biro/ Lembaga Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Sdr. BPK RI Perwakilan Sumatera Barat

Yth. Sdr. Pimpinan BUMN dan BUMD Sumatera Barat

Yth. Saudara Sekwan DPRD Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran, dan para Wartawan, serta hadirin yang berbahagia.

Hadirin yang kami muliakan,

Terimakasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi PDI Perjuangan dan PKB untuk menyampaikan Pandangan Umumnya terhadap Ranperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Seizin Pimpinan Rapat Paripurna kami mengajak kita semua untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan seizin-Nya kita dapat menghadiri dan melaksanakan Rapat Paripurna hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Selanjutnya Shalawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan kearwah nabi besar kita, Muhammad SAW junjungan alam pembawa perubahan, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju sinar kemajuaan-minazzulumati ilannur - sebagaimana yang kita rasakan hari ini, serta selalu kita dambakan safaatnya siang dan malam.

Hadirin yang kami muliakan,

Hari Rabu kemarin Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan Nota Pengantar terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya, dan sesuai dengan agenda hari ini semua fraksi-fraksi akan menyampaikan pandangan umumnya terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini sangat penting untuk dibahas karena berbagai persoalan yang ada dalam perjalanan APBD Awal Tahun Anggaran 2024 sehingga perlu dilakukan perubahan, Fraksi PDI Perjuangan dan PKB ketika pembahasan KUPA-PPAS Tahun 2024 (sebagai landasan) yang lalu telah memberikan beberapa catatan-catatan sebagai bahagian dari pembahasan Perubahan APBD Tahun 2024 ini agar Perubahan APBD Tahun 2024 ini dapat menutupi kekurangan-kekurangan pada APBD Awal Tahun Anggaran 2024, selanjutnya izinkalah Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan umumnya sebagai berikut:

1. Di dalam Nota Pengantar tentang Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini Bidang Pendapatan Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp 6.877.451.649.287 meningkat 4,42 % dari APBD Awal yaitu Rp. 6.586.576.217.900.- dengan segala usaha diantaranya menaikkan pendapatan dari sector Pajak Daerah sebesar 8.48%, Retribusi sebesar 3.76%, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 3,29%, sekaitan dengan hal ini Fraksi kami ingin menyampaikan pertanyaan hal apa yang membuat Pemerintah Daerah Provinsi Sumatea Barat begitu optimisnya sector pendapatan ini dapat dinaikan dalam kondisi perekonomian masyarakat yang masih lemah ini, mohon penjelasan.
2. Terhadap laporan semester pada kondisi Pendapatan Daerah yang baru tercapai sekitar 43,25% sementara pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini akan dinaikan 4,42 %, menurut hemat Fraksi PDI Perjuangan dan PKB ini cukup mengkhawatirkan, mohon penjelasan apa yang menjadi kendala yang seharusnya pada Semester 1 sudah melebihi tercapai 50%, mengingat ketergantungan pembangunan daerah yang sangat besar pada PAD.
3. Pada tahun 2023 Fraksi PDI Perjuangan dan PKB pernah menyampaikan hal ini yaitu: *Kita ketahui didalam Akuntansi Pemerintahan bahwa Pendapatan dengan Belanja harus selalu berimbang* namun pada tahun ini terjadi kembali apa yang kami sampaikan tahun lalu bahwa telah terjadi ketidak seimbangan antar Pendapatan Daerah sebesar Rp 6.877.451.649.287 sedangkan Belanja Daerah sebesar Rp. 7.037.899.193.712,- sehingga pada tahun ini terjadi defisit sebesar Rp.160.447.544.425, pertanyaam Fraksi kami kenapa hal ini terjadi kembali? Apakah karena tidak optimalnya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas untuk mengamankan APBD Tahun Anggaran 2024? Atau karena lalainya OPD-OPD yang diberikan tugas untuk mengamankan APBD Tahun Anggaran 2024?, mohon menjelaskan.

4. Tentang Belanja Daerah yang semula dianggarkan sebesar Rp 6.818.020.392.949, menjadi Rp 7.037.899.193.712, naik sebesar Rp 219.878.800.763 yang menurut Fraksi kami tidak terlalu signifikan, namun Fraksi kami dalam hal Belanja Daerah memberikan catatan penting tentang realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 ini baru terserap sebesar Rp 2.651.718.812.873,60 (KUPA-PPAS Tahun 2024) artinya masih jauh dibawah 50%. Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menanyakan apa yang menyebabkan lambatnya realisasi belanja daerah ini? Bukankah hal tersebut akan berdampak kepada layanan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakatnya? Bagaimana langkah kongkrit Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan OPD terkait agar serapan belanja daerah bisa maksimal sehingga pembangunan dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan target-target yang ada, mohon penjelasannya.

Sdr. Pimpinan dan rekan-rekan anggota Dewan yang terhormat, dan para hadirin yang berbahagia.

Berdasarkan pertanyaan yang kami sampaikan di atas, Fraksi PDI Perjuangan dan PKB siap untuk membahas Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini lebih mendalam lagi untuk dilanjutkan pembahasannya.

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan dan PKB terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atas segala perhatian Rapat Dewan yang terhormat, kami ucapkan terimakasih.

*Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Padang, 01 Agustus 2024

PIMPINAN FRAKSI
PDI PERJUANGAN DAN PKB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Albert Hendra Lukman, SE
Ketua

Firdaus, S.H.I
Sekretaris



**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

JL. KHATIB SULAIMAN NO. 87 (0751) 7057591-7057592-7057593 FAX (0751) 59236
PADANG



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024
DISAMPAIKAN OLEH :
TANGGAL : 01 AGUSTUS 2024**

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh

- Yang kami hormati saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
- Yang kami hormati ketua, wakil ketua dan segenap anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
- Yang kami hormati, Forkopinda Provinsi Sumatera Barat
- Yang kami hormati Saudara Sekda beserta jajaran
- Para tamu undangan, rekan-rekan media pers serta segenap hadirin yang berbahagia

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan berbagai karunia dan kenikmatan kepada kita, sehingga saat ini kita dapat bersama-sama menghadiri dan melaksanakan sidang paripurna ini dalam keadaan beriman, sehat jasmani dan rohani.

Shalawat dan salam kita doakan, semoga selalu tercurah kepada Sang Nabi agung, Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Selanjutnya kami mengucapkan terimakasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi PAN terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2024 ini.

Saudara Gubernur, Hadirin sidang dewan yang kami hormati,

Pada kesempatan yang baik ini, Fraksi PAN menyampaikan terimakasih kepada Yth. Sdr. Gubernur dan segenap Jajaran Eksekutif Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah menyusun dan menyampaikan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini. Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024 ini tentunya harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberlanjutan rencana pembangunan Sumatera Barat yang telah dituangkan dalam RPJMD dan untuk jangka pendeknya akan menjadi anggaran yang beradaptasi secara efektif dengan kebutuhan saat temporer. Karena itu, DPRD melalui komisi-komisi perlu untuk melakukan pembahasan secara cermat dan kritis agar penganggaran dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024 ini berkorelasi positif terhadap pencapaian-pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang lebih berkualitas. Pada momen yang istimewa ini.

Sidang dewan yang berbahagia...

Tahun 2024 sebenarnya adalah tahun ke 4 dalam merealisasikan pencapaian target-target dan indikator yang telah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan visi-misi kepala daerah yang baru. Di samping itu, karena hal yang kita proses saat ini

adalah Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024 dari APBD awal yang sudah direncanakan dan disepakati, pada kesempatan ini, kami ingin mendapat penjelasan tentang pencapaian terhadap indikator-indikator kinerja anggaran.

Lebih spesifik kami minta penjelasan lagi tentang target kontribusi pertumbuhan sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat Tahun 2024 terhadap inflasi yang cukup tinggi, menjadi urutan ke 2 di Indonesia. Hal ini menjadi penting bagi kami Fraksi PAN, karena pertanian merupakan sektor yang paling besar menampung kehidupan masyarakat yang oleh karena sektor ini tentunya mesti menjadi perhatian utama.

Rapat Dewan Yang Terormat,

Fraksi PAN kembali menegaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah berkewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu SKPD dan antar SKPD, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing SKPD serta sinkronisasi program dan kegiatan antar tingkatan pemerintahan. Kami minta penjelasan, untuk Perubahan anggaran tahun 2024, seperti apa hal ini diwujudkan, terutama dalam hal isu-isu strategis, seperti IPM, penanggulangan kemiskinan, pengangguran, kesenjangan wilayah, lingkungan hidup, infrastruktur dan ketahanan pangan. Seperti apa hal ini dikelola secara afektif dan afisien dalam pencapaian

target-targetnya dan melibatkan semua SKPD terkait secara terpadu? Mohon penjelasan.

Rapat Dewan Yang Terormat,

Pada Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2024, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp.6.877.000.000.000.- yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan/ transfer serta lain-lain pendapatan yang sah. Salah satu hal yang harus dicermati secara seksama adalah masalah kenaikan atau penurunan proyeksi pendapatan daerah tahun 2024 yang sangat kisarannya tidaklah jauh kecil. Begitu juga jika dilihat dari aspek pendapatan asli daerah (PAD), hanya berkisar pada persentase yang tidak jauh berbeda dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, atas kondisi ini, Fraksi PAN merekomendasikan pada saat pembahasan di komisi-komisi, khususnya komisi yang membidangi keuangan, perlu ada pencermatan dan pengkritikan, sehingga ditemukan informasi akurat tentang potensi dan proyeksi pendapatan.

Rapat Dewan Yang Berbahagia,

Kami juga meminta penjelasan strategi pemerintah daerah dalam meraup pendapatan pada Rumah Sakit yang dimiliki oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat yang hingga kini masih terkendala di banyak hal, baik administrasi maupun fasilitas. Bagaimana solusi cepat yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Disamping itu, kami juga meminta penjelasan tentang pendapatan jasa usaha dinas lingkungan hidup dalam hal pengelolaan limbah B3 rumah sakit.

Rapat Dewan Yang Berbahagia,

Perubahan APBD tidak dapat di lepaskan dari paling kurang lima keadaan yaitu, pertama perubahan asumsi makro, yang antara lain asumsi pertumbuhan ekonomi, asumsi pengangguran terbuka dan lain sebagainya, yang kedua kekurangan silva yang di jadikan penerimaan pembiayaan Tahun 2023 hasil audit BPK RI tahun 2023 nomor 47.b/lhp/xviii.pdg/05/2024 tanggal 17 mei 2024 yang semulanya di proyeksi silva tahun 2023. Rp 251.444.175.049, ternyata realisasinya Rp. 180.447.544.425 kekurangan Rp. 70.996.630.623, ketiga terjadinya bencana alam yang membutuhkan tindakan segera, merusak fasilitas umum, jalan, jembatan dan sarana publik lainnya, seperti erupsi gunung merapi, longsor, banjir bandang dan lainnya, ke empat perubahan peraturan dan perundang-undangan pusat yang memerlukan pergeseran anggaran pada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, termasuk perubahan pergub atau perda yang harus terakomodasi dalam KUA PPAS perubahan APBD 2024, seperti misalnya surat Menteri Dalam Negeri Nomor 999.1.15.5/20741/keuda tentang hasil pemetaan dan pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait dana alokasi khusus tahun 2024 dan ke lima kewajiban kembali menganggarkan sisa dana baik fisik atau non fisik serta sisa keuangan khusus bkk kabupaten kota sesumatera barat kemudian ada juga alasan perubahan lainnya seperti penurunan belanja pegawai pada tahun 2024 dengan pemberlakuan PP nomor 2024, dan perlunya alokasi anggaran kurang salur dana bagi hasil pajak Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Apapun alasannya, bagi fraksi asal konstitusional dan memiliki landasan empiris, yuridis dan pembangunan provinsi sumatera barat tidak elok untuk di rintangi, apalagi mendesak seperti akomodasi perbaikan sarana dan prasarana karena bencana alam atau penyesuaian regulasi yang mengalami pergeseran atau perubahan seperti perubahan pp, perubahan peraturan kementerian atau perubahan perda atau pergub. Hanya saja yang perlu di perjelas dokumentasi pengajuan perubahan yang autentik, valid dan faktual yang perlu di hadirkan dalam pembahasan serta menjaga antara keseimbangan pendapatan pembelanjaan dan pembiayaan yang perlu di kupas dalam penetapannya ini.

Sesuai ajuan saudara gubernur pada paripurna kemaren, rabu 31 juli 2024, di pahami postur perubahan p apbd 2024 di antaranya dari total apbd 6,837 t menjadi 7,057 T dengan kenaikan 220,01 T dengan defisit 160,447 milyar yang merupakan sisa lebih belanja daerah dengan pendapatan daerah 2024 ini yang di tutupi dengan pembiayaan netto sisa lebih penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan daerah yang menjadi silpa tahun APBD 2023.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Sebelum pembahasan terhadap ranperda p apbd ini farksi bermaksud memohon penjelasan kepada saudara gubernur terkait defisit pembelanjaan daerah yang terjadi, apa solusi lain selain menutupinya dengan pembiayaan netto, bagaimana dengan waktu yang berlebih ini pendapatan daerah dapat di wujudkan, bagaimana kegiatan belanja yang tak terakomodasi pada apbd

awal dapat di biayai dan penerimaan pembiayaan dapat di tingkatkan untuk menjadi silpa di apbd berikut ini dalam memenuhi APBD yang berimbang tahun anggaran 2025. Mohon penjelasannya.

Rapat Dewan Yang Terhormat,

Sebagai fraksi juga perlu penjelasan saudara gubernur sebelum di lanjutkan pada tingkat pembahasan antara lain, sejauh mana perubahan terjadi dalam keadaan makro daerah, seperti angka pengangguran terbuka dan solusinya apa yang bisa di lakukan dalam waktu kasib ini, indikator pertumbuhan ekonomi merangkak naik apa bukti yang bisa di perlihatkan dan inflansi yang tak terkandali bagaimana mengatasinya. Selanjutnya silpa yang di harapkan semula ternyata berkurang apa dasar dan logikanya sehingga itu terjadi sehingga terjadi kekurangan penerimaan, terjadinya bencana alam yang membutuhkan perbaikan sarana dan prasarana dari mana solusinya dan sejauhmana perkembangannya termasuk penjelasan perbaikan jalan antara Kab Padang Pariaman dan Kota Padang Panjang serta bagaimana santunan untuk korban yang terkena bencana dari alokasi dana APBD Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya dengan perubahan regulasi dan peraturan yang lebih tinggi serta Perda dan Pergub, bagaimana penjelasan nya terkait dengan regulasi dan perda yang tidak dapat di realisasikan, bagaimana semestinya dengan Perda dan Pergub lainnya yang tidak dapat terpisahkan dari dasar yuridis APBD itu sendiri. Kemudian bagaimana penjelasan saudara gubernur terkait dengan penurunan belanja pegawai realisasi aktual dalam rangka mewujudkan PP No. 14 tahun 2024, mohon penjelasannya.....

Rapat dewan yang berbahagia....

Demikianlah ***Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap Nota Penjelasan Gubernur Atas Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.*** Akhirnya, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan Rahmat, Barokah dan Ridhonya dalam setiap langkah perjuangan kita untuk membangun Sumatera Barat lebih baik.

WallahulmuwafiqilaaAqwaamithThoriq

Wassalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh.

Padang, 01 AGUSTUS 2024
FRAKSI PAN DPRD SUMATERA BARAT

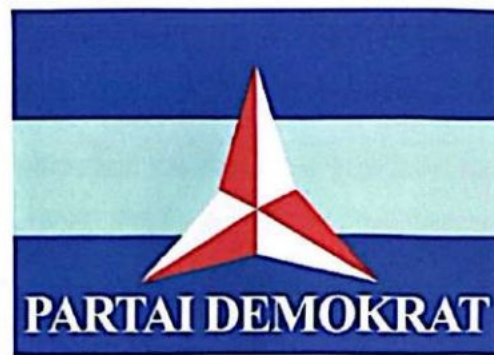
MAHAYATUL, SE, MSi.
KETUA

H. DASWANTO, SE
SEKRETARIS

H. INDRA DT RAJO LELO, SH., MM	: PENASEHAT FRAKSI
MUHAYATUL, SE, MSi	: KETUA FRAKSI
H. MAIGUS NASIR, S.Pd	: WAKIL KETUA FRAKSI
H. DASWANTO, SE	: SEKRETARIS FRAKSI
H. DODY DELVY, SE	: BENDAHARA FRAKSI
H. MUZLI M. NUR, S.PD	: ANGGOTA FRAKSI
H. BUKHARI DT TUO, SE	: ANGGOTA FRAKSI
H. AHMAD RIUS, SH	: ANGGOTA FRAKSI
Hj. ARTATI, SH, MH	: ANGGOTA FRAKSI
MUHAMMAD IKHBAL, SE	: ANGGOTA FRAKSI

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP**

RANPERDA APBD PERUBAHAN TAHUN 2024



**Disampaikan Dalam Rapat Paripurna Dalam
Rangka Penyampaian
Pandangan Umum Fraksi :**

Kamis, 1 Agustus 2024

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yth.Sdr. Gubernur, Atau yang mewakili

Yth.Sdr. Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr. Sekretaris Daerah , Staf Ahli, Asisten, Kepala Badan, Dinas , Kantor
Dilingkup Provinsi Sumatera Barat

Yth.Sdr. Ketua-Ketua Fraksi, Rekan-Rekan dan Anggota DPRD Provinsi
Sumatera Barat.

Yth. Hadirin Yang Berbahagia

Pertama dan utama sekali marilah sama-sama panjatkan puji dan syukur
atas kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya,
pada siang hari ini kita kembali dapat hadir pada Rapat Paripurna Dalam
Rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda: **APBD
PERUBAHAN TAHUN 2024**

Sholawat & salam mari kita sampaikan kepada Junjungan kita Nabi besar
Muhammad SAW, karena atas kerja kerasnya umat manusia telah dapat keluar
dari lembah jahiliyah kepada kehidupan yang ber-adab.

Selanjutnya, pada kesempatan ini kami dari **Fraksi Partai Demokrat**,
menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tulus kami kepada
Gubernur Prov Sumatera Barat dan Tim yang telah Menyusun ranperda ini,
Hasilnya sudah sama-sama kita dengar Pembacaan Nota Pengantar dari
Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang telah dibacakan tadi. Selanjutnya kami
juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan DPRD, yang telah
memberikan kesempatan kepada **Fraksi Partai Demokrat**, untuk
menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap, Ranperda APBD Perubahan
Tahun 2024, sebelum diambil keputusan di tingkat Paripurna nanti.

Sdr. Gubernur dan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, hadirin dan hadirat yang Kami Hormati;

Berkaitan dengan substansi yang telah termuat dalam Laporan yang telah dibacakan tadi, kami **Fraksi Partai Demokrat** dapat menelaah terkait Ranperda APBD Perubahan Tahun 2024 dan juga ada tambahan sesuai yang ada dalam Pandangan Umum **Fraksi Partai Demokrat** untuk dijadikan pedoman serta catatan untuk Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perkenankan kami menyampaikan Pandangan Umum, catatan dan saran dalam Pandangan Umum **Fraksi Partai Demokrat** Sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi rencana kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini sesuai dengan prinsip dasar pendapatan, yaitu pemerintahan harus berupaya untuk menggali sumber pendapatan secara luas sehingga pendapatan daerah dapat terkumpul secara maksimal, semangat menggali pendapatan daerah jangan sampai membebani perekonomian masyarakat, Pemerintahan Provinsi Sumbar harus dapat membuka, membangun, memfasilitasi, dan mengembangkan usaha Masyarakat secara maksimal, apabila pendapatan Masyarakat meningkat, maka pendapatan daerah juga akan meningkat melalui pajak dan retribusi daerah. Perubahan yang terjadi pada PAD yang disebabkan oleh penyesuaian dengan perkembangan perekonomian dan ketentuan perundang- undangan serta perubahan pada pendapatan transfer. Fraksi Demokrat berharap bahwa Lembaga yang terkait dengan pendapatan agar terus menggali sumber-sumber pendapatan baru yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Langkah dan kebijakan yang di ambil oleh pemerintah Provinsi Sumbar harus di imbangi dengan kinerja yang maksimal, maka dari itu pengawasan dan evaluasi perlu ditingkatkan. Tentunya kita juga meminta Pemprov untuk menjelaskan strategi yang akan dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan, yang mana kemiskinan merupakan suatu kondisi Dimana merupakan salah satu acuan kemajuan suatu daerah.
3. Dalam upaya mengoptimalisasikan pajak dan retribusi daerah, Pemprov perlu melakukan pemetaan dan basis data, sehingga mendapatkan data yang akurat dan terkini, mohon penjelasan.
4. Perlu diketahui bahwa pendapatan asli daerah (PAD) Pada Ranperda perubahan APBD tahun 2024 direncanakan bertambah sebesar 3,394 triliun rupiah naik sebesar 8,84% atau sebesar 275,778 miliar rupiah dari target APBD awal senilai 3,118 triliun rupiah. Dalam kenaikan PAD ini masih bertumpu pada pendapatan pajak dan retribusi daerah. Tentunya Pemprov harus bisa menggali potensi lainya dalam meningkatkan PAD.
5. Melihat sumber pendapatan daerah pada Ranperda perubahan APBD tahun 2024, pendapatan transfer mengalami kenaikan sebesar 2,250 miliar rupiah sehingga menjadi 3,453 triliun rupiah, kami memandang adanya ketergantungan dana transfer dari pemerintahan pusat sangat besar, hal itu akan sangat berpengaruh pada kemampuan keuangan daerah, maka diperlukan adanya formulasi yang baik agar ketergantungan tersebut di imbangi dengan peningkatan pendapatan asli daerah.

6. Belanja daerah sebagai komponen ke uangan daerah, dalam kerangka ekonomi makro, diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan penambahan APBD tersebut tentunya dalam belanja juga diperhatikan efektivitas anggaran, dalam rangka melakukan efektivitas anggaran, Fraksi Demokrat Mengharapkan Pemprov Sumbar perlu melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan anggaran termasuk kepada Stakeholder dan Masyarakat, hal ini dikarenakan pelaksanaan sangat mendesak dan dapat berakibat pada kesalahan dalam laporan ke uangan dan lonjakan Silpa, apabila dana tidak terserap dikarenakan kegiatan tidak terlaksana.
7. Kami meminta aparatur sipil negara (ASN) di Provinsi Sumatera Barat agar netral saat momen pemilihan kepala daerah Pada november 2024, untuk antisipasi hal tersebut, Langkah apa yang dilaksanakn Eksekutif untuk menjaga netralitasnya.

Sdr. Gubernur dan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, hadirin dan hadirat yang Kami Hormati ;

Demikianlah beberapa hal Pandangan, Catatan dan Saran dari Pandangan Umum **Fraksi Partai Demokrat** terhadap :

APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

Dengan mengucapkan **“Bismillahirrahmanirrahim”** Ranperda APBD Perubahan Tahun 2024 tersebut dapat untuk dilanjutkan ketahapan selanjutnya dengan memperhatikan Pandangan, Catatan dan Saran yang kami bacakan diatas.

Terima Kasih,

Hormat kami,

Padang, 1, Agustus 2024

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

Sekretaris,

ALI TANJUNG

Hj. A I D A, SH

Wabillahi Taufik Wall Hidayah,

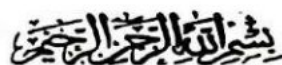
Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penasehat	: 1. H. Suwirpen Suib. S.Sos
Ketua	: 2. Ali Tanjung
Wakil Ketua	: 3. Suharjono. SE
Sekretaris	: 4. Hj. Aida. SH
Bendahara	: 5. Jefri Masrul. SE
Anggota	: 6. H. M. Numas, ST
	7. Ir.H.Arkadius.Dt. Intan Bano. MM. MBA
	8. H. Ismet Amzis. SH
	9 .H. Irzal Ilyas Dt. Lawik Basa. MM



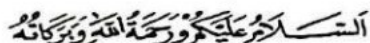
FRAKSI PPP – NasDem
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 7057591 – 7057592 – 7057593 Fax (0751) 59328 Padang 25133



Pandangan Umum
Fraksi PPP-NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat
Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD
Provinsi Sumatera Barat Kamis, 01 Agustus 2024



Yth. Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Yth. Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Forkopimda, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama
Sumatera Barat

Yth. Sdr. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Yth. Sdr. Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Kepala Badan, Dinas, Kantor dan
Lembaga Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Pimpinan Parpol, Organisasi kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Para
Wartawan dan Hadirin yang Berbahagia.

Puji Syukur marilah sama-sama kita aturkan kepada Allah SWT, karena
berkat ridha dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat kesehatan dan kekuatan
untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini.

Selanjutnya salawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengangkat derajat manusia menjadi insan kamil dimuka bumi ini, dan kehadiran beliau sebagai pembawa rahmat untuk sekalian alam.

Terimakasih kepada Saudara Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi PPP-NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Paripurna DPRD Sumbar di ruang yang terhormat ini.

Dan secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Fraksi PPP-NasDem yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai juru bicara, untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi PPP-NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati

Fraksi PPP-NasDem mengucapkan terima kasih kepada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 pada hari Rabu, 31 Juli 2024.

Setelah mencermati dan melakukan analisa terhadap nota pengantar Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 dan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024, Fraksi PPP-NasDem memberikan beberapa pertanyaan dan catatan penting sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Adapun beberapa pertanyaan dan catatan dari Fraksi kami berkenaan dengan Raperda Perubahan APBD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan APBD Tahun 2024 selama tahun berjalan, masih mengalami ketidakpastian. Perkembangan makro ekonomi daerah, pendapatan dan belanja daerah, mengalami perubahan yang sejalan dengan ketidakpastian tersebut. Kami berprasangka baik, bahwa penyusunan Ranperda Perubahan APBD tahun 2024 ini betul-betul mengacu kepada KUA-PPAS Perubahan tahun 2024 yang kita sepakati bersama sebagai dokumen perencanaan yang melandasi pengajuan RAPBD Perubahan tersebut oleh Saudara Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kami juga berprasangka baik bahwa dalam menyusun program dan kegiatan dalam tahun anggaran 2024 ini, Saudara Gubernur tetap bertumpu kepada program prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD,
2. Fraksi PPP-NasDem sepakat dan mendorong terhadap upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan optimalisasi penerimaan daerah melalui beberapa rencana sebagai berikut :
 - a) Penerimaan Pajak daerah dan Retribusi daerah, kira-kira dengan sisa waktu yang ada. apa yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk memaksimalkan upaya ini. Berdasarkan informasi di lapangan banyak wajib pajak yang menunda bahkan tidak membayar pajak, misalnya pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain.
 - b) Pemanfaatan aset-aset yang ideal. Kira-kira potensi yang mana dan apa saja dari aset ideal ini yang bisa dimanfaatkan dalam usaha peningkatan pendapatan daerah dalam waktu dekat.
 - c) Dalam sisa waktu kurang dari 4 bulan bagaimana mendayagunakan OPD pengelola BLUD dan UPTD-UPTD lainnya dalam rangka akselerasi untuk berkontribusi mengoptimalkan penerimaan daerah.

- d) Fraksi PPP-NasDem sangat menyayangkan terjadinya defisit yang begitu besar pada Perubahan APBD Tahun 2024, hal ini harus menjadi catatan penting bagi TAPD dan OPD bahwa dalam penyusunan dan perencanaan anggaran harus benar-benar terukur dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak terjadi lagi defisit anggaran seperti saat sekarang ini, pemerintah daerah harus menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran agar hal ini tidak lagi terjadi di kemudian hari. Untuk mengatasi masalah ini apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat?
3. Kembali kami sampaikan saat ini Masyarakat Pasaman dan Pasaman Barat sangat membutuhkan Pembangunan penguatan tebing Batang Ampu yang berada di Kabupaten Pasaman Barat dan Penguatan Tebing Batang Landir Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman hal ini dikarenakan sering terjadinya banjir di daerah tersebut dan sudah mengakibatkan terkikisnya tebing-tebing yang ada di sekitar lokasi sungai dan mengakibatkan banyak rumah masyarakat sekitar yang hampir runtuh, untuk itu Fraksi PPP-NasDem meminta keseriusan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya kepada dinas terkait (PSDA) untuk mengatasi hal ini sesegera mungkin karena ini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Mohon tanggapan saudara Gubernur.
4. Fraksi PPP-NasDem berharap agar semua proyek yang didanai dari anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) benar-benar dioptimalkan pengerjaan dan tetap memperhatikan kualitas bangunannya. Hal ini menjadi penting kami ingatkan karena saat ini kita sudah berada di bulan Agustus 2024, yang artinya hanya dalam waktu 5 bulan ke depan, Tahun Anggaran 2024 akan berakhir. Terkait hal ini mohon tanggapan saudara Gubernur?
5. Fraksi PPP-NasDem meminta kepada Pemerintah Daerah untuk segera melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan dan sudah anggarkan

pada APBD Murni Tahun 2024 yang lalu, karna kami melihat masih banyak kegiatan pada OPD-OPD tertentu yang kegiatan nya masih banyak yang belum dilaksanakan, bahkan masih ada yang belum selesai perencanaannya, terkait hal ini mohon tanggapannya.

6. Fraksi PPP-NasDem meminta kepada Pemerintah Daerah pada APBD Perubahan agar tidak menganggarkan kegiatan fisik dan belanja modal yang sifatnya ditenderkan mengingat waktu yang sangat singkat, mohon tanggapannya.
7. Fraksi PPP-NasDem meminta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur agar memerintahkan ketua TAPD untuk memaksimalkan Pendapatan Daerah dan menyisir/menunda kegiatan-kegiatan OPD yang tidak urgen khususnya pada belanja barang dan jasa, mohon tanggapannya.
8. Sebagaimana kita tahu, dunia pendidikan sangat penting artinya bagi semua orang, yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri. Dengan semakin bertumbuh dan berkembang setiap individu bisa memiliki kreativitas, pengetahuan yang lebih luas, kepribadian yang baik dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Khusus di Dinas Pendidikan, Fraksi PPP-NasDem meminta alokasi anggaran diarahkan untuk menambah sarana prasarana yang berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan. Jangan hanya memperbanyak pertemuan-pertemuan, seminar-seminar yang kurang bermanfaat dan tidak berpengaruh langsung terhadap naiknya kualitas pendidikan. Mohon penjelasan saudara gubernur.
9. Ada pun pada belanja tak terduga, Fraksi PPP-NasDem setuju agar mengalokasikan anggaran yang seminimalnya sesuai dengan petunjuk dari Kemendagri. Sehingga nanti dalam pelaksanaan APBD Perubahan yang waktunya sangat singkat akan lebih lancar.
10. Terkait distribusi dan alokasi anggaran yang diajukan pada Perubahan APBD tahun 2024, Fraksi PPP-NasDem berpandangan masih banyak

alokasi anggaran yang belum berpihak kepada peningkatan pelayanan publik dan pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan. Kami sangat berharap alokasi dan distribusi anggaran baik pada Perubahan 2024 maupun pada RAPBD tahun 2025 lebih diarahkan untuk memperkuat perekonomian daerah, karena intervensi Pemerintah Daerah dalam bentuk alokasi anggaran tak bisa diabaikan.

11. Mohon penjelasan rinci Saudara Gubernur, terkait standarisasi dan efektivitas dari Program Unggulan (Progul) yang sudah sering disampaikan kepada public sebagai program Gubernur-Wakil Gubernur. Fraksi Partai Gerindra tentu saja sangat berharap, Progul yang sudah disusun dapat terlaksana dengan baik, sehingga keberadaan program tersebut bisa dirasakan masyarakat banyak.

Selanjutnya Ada beberapa pertanyaan dan catatan dari Fraksi kami berkenaan dengan masalah yang terjadi di Masyarakat saat ini dan hal ini perlu dicarikan solusi secepatnya oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 Juni 2024 lalu, sebagai lanjutan dari informasi dan harapan masyarakat sebelumnya, maka untuk ketiga kalinya kembali kami sampaikan, menyangkaut persoalan pukot harimau atau hamparan dasar, yang masih beroperasi di seputar Pasir Ganting nagari Pulau Rajo Kecamatan Air Pura, Air Haji dan Muaro Kandih Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti. Pukot Harimau ini dimiliki orang-orang bagak yang punya hubungan khusus dengan petugas. Sehingga mereka ini bersilantangan saja di kawasan ini. Sudah banyak jaring, alat penangkap ikan lainnya yang putus, porak poranda ditarik dan dicabik oleh pukot harimau ini. Pernah ditertibkan, tapi malangnya sampai hari ini mereka tetap beroperasi dan memperlihatkan kebagakkannya. Untuk Gubernur katahui dan catat, bahwa hari ini, masyarakat sekitar kawasan yang kami sebutkan

tadi tidak lagi mendapatkan ikan di tempat mereka, sehingga harus melaut sampai ke Painan dan bahkan lebih jauh dari itu, demi mendapatkan sesuap nasi dan kebutuhan anak sekolah. Sehingga makin lama meninggalkan anak dan istri. Terhadap kondisi ini, Gubernur sudah menjawab dan kami memahaminya. Tapi sebagai juru bicara Masyarakat di forum ini, kami berharap Gubernur tidak boleh kalah oleh oknum yang membagak itu. Jangan sampai masyarakat yang lemah tidak mendapat perlindungan yang memadai dari pimpinannya. Rasanya juga tidak logis, kalau Gubernur bisa dikecoh dan dikalahkan oleh oknum seperti itu.

2. Di Tua Pejat Mentawai, sampai sekitar tanggal 31 Juli 2024 lalu, belum memiliki AMBULANCE LAUT, yang mampu melayani dan menangani masyarakat yang sakit atau kematian. Baik antar pulau dalam daerah Mentawai maupun antara Mentawai dengan Ibu Kota Provinsi Sumbar Kota Padang. Masyarakat harus menyewa antara 15 sampai 20 Juta rupiah untuk ini. Masyarakat belum atau tidak mampu untuk membayar yang semahal itu. Apakah ini harus disediakan oleh Bupati dengan APBDnya atau oleh Gubernur dengan APBD provinsinya, mohon penjelasannya.

pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati

Demikianlah Pandangan Umum dari Fraksi PPP-NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dapat kami sampaikan dalam rapat peripurna ini, jika ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami mohon maaf dan kepada Allah jua kami mohon ampun.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah

وَلَسْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَةً اَللّٰهُ وَبَرَكَاتُهُ

Padang, 01 Agustus 2024

H. Daswippetra, DT. Manjinjiang Alam
Juru Bicara

**Fraksi PPP-NasDem
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Barat**

Sawal, SH
Ketua

Irwan Afriadi
Sekretaris



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No 87 Padang Utara



PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
PERUBAHAN TAHUN 2024

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Yth: Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Yth: Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Yth: Saudara Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat

Yth: Saudara-saudara anggota Forum komunikasi pimpinan daerah

Yth: Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat

Yth: Saudara Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat

Yth: Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Pimpinan BUMN dan BUMD, Pimpinan Ormas, Partai Politik, LSM, wartawan dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama kami ingin mengajak kita semua untuk senantiasa mengucapkan puji syukur atas nikmat Allah SWT, serta memuji dan memujanya karna telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini pada acara rapat paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat. *Shalawat* serta salam semoga senantiasa tercurah kepada *uswah hasanah* kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, *Amin..*



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No 87 Padang Utara



Saudara Gubernur, Pimpinan, Anggota Dewan dan Hadirin yang berbahagia

Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pada pasal Pasal 161 ayat (2) menyebutkan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa.

Pada hari Rabu 31 Juli 2024 Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan Nota pengantar atas perubahan APBD 2024. Terlebih dahulu pada tanggal 27 Juli 2024 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menandatangani nota kesepakatan bersama atas KUPA-PPAS tahun 2024.

Pada perubahan APBD 2024 bahwa proyeksi pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 290.875.431.387 atau meningkat sebesar 4,42% sehingga perubahan pendapatan APBD 2024 sebesar Rp 6,877 T, disisi lain terdapat juga proyeksi kenaikan belanja daerah sebesar Rp. 219,878 Miliar, sehingga menyebabkan defisit APBD sebanyak 160,447 Miliar.

Fraksi PKS berterimakasih kepada pemerintah daerah yang sudah berupaya maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan 3,5 tahun ini, tentu ini tidak mudah, terus ada perbaikan-perbaikan dalam tata pemerintahan Sumatera Barat, ini adalah usaha dalam mewujudkan visi pemerintah daerah untuk Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan.

Saudara Gubernur, Pimpinan, Anggota Dewan dan Hadirin yang berbahagia



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No 87 Padang Utara



Setelah membaca dan mendiskusikan Nota Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2024, dan setelah kami menelaah beberapa hal yang melatarbelakangi pengajuan Nota Pengantar Rancangan APBD Perubahan 2024 ini, Fraksi PKS mempunyai beberapa pandangan yang akan disampaikan diantaranya :

1. Ditinjau dari kondisi umum pendapatan daerah pada semester 1 ini terlihat cukup signifikan progres capaian pendapatan daerah, baik dari PAD yang baru terealisasi sebesar 43,25%, pendapatan transfer, 48,48% untuk Pendapatan lain-lain daerah yang sah 2,95%. perlu Langkah pemprov dalam memenuhi target realisasi pendapatan di semester II ini.
2. Fraksi PKS mendorong agar program-program yang menjadi urusan pelayanan dasar, non pelayanan dasar agar dapat dilaksanakan seoptimal mungkin, terutama fokus kepada renovasi fasilitas umum yang terdampak bencana walaupun semenjak 11 Mei 2024 kemacetan di jalan Padang lua , Malalak, Sicicin, dan Solok – Padang, Alhamdulillah jalan padang-bukittinggi via lembah anai sudah dapat dilalui mulai tanggal 21 Juli 2024 Pemprov yang cepat tanggap berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten kota.
3. Terhadap hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sudah mencapai realisasi 97%. Tentu hal ini jauh dapat ditingkatkan mengingat bahwa penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini adalah laba dari penyertaan modal kepada BUMD-BUMD yang dimiliki pemprov. Fraksi PKS mendorong dapat peningkatan kinerja BUMD dalam menambah deviden dalam peningkatan pendapatan asli daerah.
4. Melihat beban belanja yang di usulkan gubernur dalam rancangan Perubahan APBD 2024, FPKS melihat terlalu berat untuk bisa dilaksanakan, mulai SILPA kurang sebesar Rp. 70.9 M, kegiatan yang



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No 87 Padang Utara



melampaui waktu pelaksanaan APBD 2023 yang dibayar di Perubahan 2023, kegiatan yang sudah serah terima (BAST) namun belum dibayar, hutang kepada kab kota berupa bagi hasil pajak kendaraan bermotor yang harus ditunaikan. Maka dari itu FPKS mendorong kepada TAPD untuk benar benar selektif lagi menambah kegiatan di saat beban kewajiban sangat berat ini.

Saudara Gubernur, Pimpinan, Anggota Dewan dan Hadirin yang berbahagia

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami tanggap dari Nota Rancangan peraturan daerah tentang APBD Perubahan 2024. Besar harapan kami kiranya penjelasan dari Saudara Gubernur nantinya dapat membantu kami dalam proses pembahasan selanjutnya, harapan kami bisa berjalan dengan baik dan sukses, sesuai harapan serta mencapai sasaran.

Wabillahirtaufik wal hidayah, Wassalamualaikum, wr.wb.

**Padang, 1 Agustus 2024 M
26 Muharram 1446 H
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
(Fraksi PKS)
DPRD Sumatera Barat**

Juru Bicara

(Drs.H.Nurfirman Wansyah, MM,Apt)

Ketua

Sekretaris

Drs.H.Nurfirman Wansyah, MM,Apt.

Muhamad Ridwan, S.IP

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP

RANPERDA TENTANG APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

**Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat
Kamis, 01 Agustus 2024**

Juru Bicara :

Assalamualaikum Wr. Wb

Yang terhormat

Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Sdr. FORKOPIMDA, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Sekretaris Daerah/Asisten/Badan/Dinas/Kantor/Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Ketua Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan BUMN/BUMD/Perguruan Tinggi se-Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, OKP, Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta hadirin dan undangan yang kami muliakan

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan

Alhamdulillahirabbil a'lam, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita semua, pada rapat hari ini, dalam rangka mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Nota Pengantar APBD Perubahan Tahun 2024.

Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, kerabat, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Bapak Ibu Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Muliakan

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas penyampaian Nota Pengantar dan Nota Keuangan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun 2024

yang disampaikan Saudara Gubernur kemarin, sebagai salah satu kewajiban konstitusi penyelenggara pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat.

Saudara Pimpinan, Gubernur dan Hadirin yang berbahagia

Berangkat dari Nota Pengantar dan Nota Keuangan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun 2024 yang telah disampaikan pada kesempatan sebelumnya, perkenankan kami menyampaikan beberapa tanggapan dan pertanyaan atas beberapa hal :

1. Kalau dicermati apa yang telah disampaikan dalam Nota Pengantar dan Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun 2024, menunjukkan pada semua bahwa, kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan daerah kita saat ini masih dalam kondisi tidak bagus. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, terdapat defisit yang cukup besar dimana tahun ini tercatat Rp 160,447 Miliar. **Mohon penjelasan Saudara Gubernur terkait hal ini dan apa langkah yang akan dilakukan?**
2. Secara umum, proyeksi Pendapatan Daerah dalam APBD Perubahan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 4,42 persen dari APBD awal sebesar RP 6,586 Triliun menjadi Rp 6,877 Triliun. Bagi Fraksi Gerindra, angka ini MASIH KALAH JAUH dan belum sesuai target yang telah dituangkan dalam RPJMD, dimana angkanya pada tahun 2024 dituliskan diatas Rp 7 Triliun rupiah. Kami melihat banyak hal yang belum sesuai dengan terget-target penerimaan daerah. **Mohon penjelasan Saudara Gubernur.**
3. Salah satu tumpuan dan sumber pendapatan daerah kita adalah dari pajak kendaraan bermotor dan BBNKB. Fraksi Partai Gerindra berharap ada langkah-langkah taktis dan strategis sebagai bentuk layanan kepada wajib pajak. Kami berpandangan bahwa para Wajib Pajak adalah pahlawan sesungguhnya dalam menggerakkan ekonomi daerah. Karena, dengan kesadaran mereka membayar setiap pajak, maka pembangunan daerah bisa bergerak. Dengan demikian, maka sudah seharusnya para wajib pajak ini mendapat pelayanan yang baik. Jangan sampai, mereka malah dibuat stress dengan layanan yang berbelit-belit saat hendak menunaikan kewajiban. **Mohon tanggapan Saudara Gubernur terkait hal ini dan langkah apa yang dilakukan..**

4. **Mohon penjelasan, sejauh mana pemanfaatan teknologi di lingkungan Pemprov Sumatera Barat terkait layanan bagi wajib pajak, karena dulu ada wacana penggunaan aplikasi khusus, sehingga warga yang ingin menunaikan kewajiban tidak perlu harus datang dari jauh atau antri berlama-lama.**
5. Kami juga mendapat informasi bahwa terdapat perbedaan data jumlah kendaraan yang terdaftar di Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh Bapenda Provinsi Sumbar, BPS Provinsi Sumbar dan Dirlantas Polda Sumbar. Perbedaan data ini perlu didudukkan kembali untuk dapat melihat berapa potensi yang sebenarnya dari objek PKB. **Mohon penjelasan dari Saudara Gubernur terkait hal ini.**
6. Sejak lama, Fraksi Partai Gerindra menyuarakan pentingnya pemanfaatan asset-asset idle sebagai salah satu sumber pendapatan. **Mohon penjelasan lengkap terkait dengan capaian pendapatan daerah dari sisi pemanfaatan asset idle ini, baik dari sisi asset untuk disewakan ataupun untuk retribusi. Dalam RPJMD disebutkan bahwa tahun 2024 ini, proyeksi peningkatan PAD dari asset idle ini adalah Rp 5,4 Miliar dari asset yang memiliki potensi untuk disewakan/KSP, dan Rp 1,4 Miliar lebih dari retribusi. Mohon dijelaskan apakah ini tercapai atau tidak, dan secara detail kami minta disampaikan proyeksi berikut capaian-capaiannya.**
7. Beberapa waktu lalu kami mendengar Saudara Gubernur menyatakan bahwa salah satu langkah yang akan dilakukan Pemprov untuk menutup defisit keuangan daerah adalah dengan melakukan pengelolaan asset dengan baik. Fraksi Partai Gerindra menyambut baik rencana tersebut. **Namun kami ingin penjelasan lengkap, bagaimana strategi dan tindak lanjut dari rencana tersebut, karena seperti kasus Balairung, Grafika dll, hingga kini belum ada penuntasan sampai saat ini. Mohon penjelasan terkait ini, termasuk soal pengelolaan Hotel Novotel yang iklannya kami lihat sedang dilelang.**
8. Belanja modal pada perubahan APBD direncanakan sebesar Rp 863,4 Miliar, atau disebut mengalami kenaikan sebesar 10,31 persen dari anggaran pada APBD awal yang tercatat sebesar Rp 782,78 Miliar. Meskipun naik dibanding APBD awal, Fraksi Partai Gerindra mencatat angka ini masih jauh lebih rendah dari proyeksi di RPJMD, dimana tahun 2024 ini seharusnya sudah di angka Rp 1, 029 Triliun. Fraksi Gerindra meminta Pemrov melalui TAPD taat dan disiplin menjadikan besaran belanja modal sesuai dengan target RPJMD, karena dari pos inilah sumber pembangunan sarana dan prasarana publik bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
9. **Mohon penjelasan lengkap dan rinci dari Saudara Gubernur, sejauhmana dampak alokasi anggaran 10 persen untuk meningkatkan pendapatan petani yang dilakukan**

sejak 2021 hingga 2024 ini, dalam kaitannya dengan peningkatan pendapatan daerah.

10. Berkaitan dengan persoalan pertanian juga, Fraksi Partai Gerindra berharap agar pejabat terkait bisa menterjemahkan RPJMD dengan baik dan punya inovasi dalam meningkatkan nilai tambah petani. Banyak kegiatan yang selama ini dijemput kawan-kawan di DPRD langsung ke lapangan tidak terlaksana. **Mohon ini menjadi catatan serius, karena pertanian adalah salah satu program unggulan.**
11. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan, merupakan salah satu misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Namun di lapangan, kami masih melihat dan mendapat laporan terkait infrastruktur yang belum memadai, termasuk misalnya di Talamau Pasaman, dimana banyak titik memprihatinkan sepanjang jalan yang dilintasi. Begitu juga halnya dengan aliran sungai Batang Sumpu yang memerlukan penanganan segera untuk normalisasi, agar persawahan di sepanjang aliran sungai itu tidak lagi dilanda banjir sebagaimana yang terjadi setiap tahunnya.
12. **Kami kembali harus mempertanyakan soal kelanjutan program SIMAMAK, yang digagas pada intinya untuk melepaskan warga dan pelaku usaha super mikro terjerat hutang seperti Pinjol dan Rentenir. Melepaskan masyarakatnya dari jeratan hutang-hutang rentenir, seharusnya menjadi prioritas kepala daerah. Namun sampai hari ini, Fraksi Partai Gerindra belum mendengar dan melihat program tersebut direalisasikan. Pertanyaannya, atas Dasar pertimbangan apakah, sehingga program SIMAMAK belum juga disetujui Gubernur dan direalisasikan dalam bentuk Pergub. Fraksi Partai Gerindra berpikiran inilah penerapan konsep ekonomi syariah sesungguhnya di Ranah ABS-SBK. Mohon jawaban dan tanggapan dari Saudara Gubernur terkait ini.**
13. Terakhir, Fraksi Partai Gerindra berharap agar Saudara Gubernur memperkuat sistem dan mekanisme eksekutif kontrol di jajaran pejabat struktural dan fungsional dalam rangka memastikan pencapaian hasil optimal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta serapan realisasi anggaran.

Bapak Ibu Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Mulikan

Demikian pandangan umum ini kami sampaikan dengan harapan menjadi perhatian dalam proses pembahasan nantinya. Atas perhatian, kami ucapkan terima kasih.

Wabillahaufik wal hidayah.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Salam Indonesia Raya III

FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua

Sekretaris

H. HIDAYAT, S.S, M.H

NURKHALS DT.BIJO DIRAJU, S.Pt

Penasihat:

✧ **Supardi**

Anggota:

1. Desrio Putra
2. Evi Yandri Rajo Budiman
3. Ismunandi Syofyan, SE
4. Jasma Juni Dt.Gadang, SE
5. Jempol
6. Khairuddin Simanjuntak
7. Mario Syahjohan
8. Mesra
9. Mukhlis Yusuf Abit, ST,M.M
10. Drs.H.Syafuruddin Putra Dt.Sungono, M.Si
11. Hj.Yunisra Syahiran, S.Pd



**FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 -57592 – 57593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133

**PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLKAR
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP
NOTA PENGANTAR GUBERNUR TENTANG
RANCANGAN APBD PERUBAHAN
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024
DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA
KAMIS, 1 AGUSTUS 2024**

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wr.wb

Yang kami hormati :

Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Sdr. Forkompimda Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD dan Kepala Biro dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran, rekan-rekan wartawan, undangan dan hadirin yang kami muliakan.

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia Nya kepada kita semua sehingga dapat hadir pada kesempatan ini, untuk melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar Gubernur tentang Rancangan APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024



**FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 -57592 – 57593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133

Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini, aamiin Ya Rabbal Alamin.

Sdr. Gubernur ,Pimpinan DPRD dan Hadirin yang kami hormati.

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat diruangan rapat yang terhormat ini.

Terima kasih juga disampaikan kepada teman-teman Fraksi Partai Golkar yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai juru bicara untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat. Semoga amanah yang diberikan kepada saya ini dapat saya laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Sdr. Gubernur , Pimpinan DPRD dan Hadirin yang kami hormati

Fraksi Partai Golkar setelah mendengarkan dan mencermati Nota Pengantar Gubernur terhadap Rancangan APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, maka pada kesempatan ini ada hal-hal yang perlu kami kritik, pertanyakan, sarankan, sebagai berikut :

1. Mencermati Nota Pengantar Gubernur terhadap Rancangan APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ,kami dari Fraksi Golkar agak sedikit prihatin karena Nota Pengantar Gubernur yang sekarang ini kualitasnya jauh menurun bila dibandingkan dengan Nota Pengantar Gubernur sebelum- sebelumnya. Pada Nota Pengantar Gubernur yang sekarang ini tidak ada dijelaskan kenapa terjadi kenaikan dan penurunan pendapatan maupun belanja. Terkesan Nota Pengantar Gubernur yang sekarang ini asal jadi atau untuk memenuhi persyaratan tahapan dari pembahasan Rancangan APBD Perubahan tahun 2024 saja. Kedepannya kami dari Fraksi Partai Golkar menyarankan agar apa yang sudah baik untuk dapat dipertahankan bila perlu ditingkatkan lagi.
2. Tahun 2024 adalah merupakan tahun terakhir dari RPJPD Provinsi Sumatera Barat untuk 20 tahun kebelakang. Dan tahun 2025 adalah base line atau awal dari RPJPD Provinsi Sumatera Barat untuk 20 tahun mendatang (tahun 2025 -2045).



**FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 -57592 – 57593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133

Berdasarkan hal tersebut, maka kami dari Fraksi Partai Golkar mendorong pihak Pemerintah Daerah agar pada APBD Perubahan tahun 2024 ini dapat hendaknya dijadikan sebagai pemacu pencapaian target indikator kinerja masing-masing OPD, sehingga target indikator kinerja yang dijadikan base line pada tahun 2025 betul-betul telah sesuai dengan capaian pada tahun 2024. Kalau seandainya capaian indikator kinerja pada tahun 2024 masih dibawah base line , maka beban yang akan dipikul pada tahun 2025 akan semakin berat.

3. Terhadap OPD yang dibebankan untuk menambah target PAD pada Rancangan APBD Perubahan tahun 2024 ini , selayaknya berbanding lurus dengan penambahan belanja, begitu sebaliknya bagi OPD yang dikurangi beban target PAD nya pada perubahan APBD tahun 2024 ini selayaknya juga dikurangi belanjanya. Untuk itu kami dari Fraksi Partai Golkar menyarankan untuk meninjau ulang kembali target pendapatan dan belanja pada masing-masing OPD.
4. Terhadap penambahan target PAD pada OPD terkait, kami dari Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan kepada TAPD apa dasar perhitungannya, begitu juga untuk pengurangan target PAD. Sejalan dengan itu juga kami pertanyakan terhadap OPD yang mendapat alokasi tambahan belanja maupun alokasi untuk pengurangan belanja apa dasar analisisnya. Sehingga dalam penetapan alokasi anggaran pendapatan dan belanja tidak terkesan pilih kasih.
5. Didalam menyusun Rancangan APBD Perubahan tahun 2024 ini , kami dari Fraksi Partai Golkar mempertanyakan sejauh mana korelasi laporan keuangan Semester I tahun 2024 terhadap penyusunan APBD Perubahan tahun 2024. Selayaknya bagi OPD yang realisasi fisik dan keuangannya masih sangat rendah pada laporan semester I tahun 2024, hendaknya ada kebijakan dari TAPD untuk melakukan re-alokasi anggaran antar OPD, sehingga kekuatiran menjadi SILPA pada tahun 2024 akan semakin bisa diminimalisir.

Sdr. Gubernur, Pimpinan DPRD dan Hadirin yang kami hormati.



**FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 -57592 – 57593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap Nota Pengantar Gubernur terhadap Rancangan APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Wabillahi Taufik Walhidayah
Assalamualaikum ww

Padang, 27 Juli 2024

Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat

Ketua

Sekretaris

(Zulkenedi Said, S.Sos, S.H., .Si., M.M., M.H.,M.AP) (Dr.H.Hardinalis Kobal, S.E.,M.M)

Juru Bicara

(Dra. SITTI IZZATI AZIZ)

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. H.Afrizal, S.H., M.H | (Wakil Ketua) |
| 2. Zarfi Deson, S.H | (Bendahara) |
| 3. Ir. H. Hendra Irwan Rahim, M.M | (Anggota) |
| 4. Drh. Nela Abdika Zamri, M.M., M.Si | (Anggota) |
| 5. Dra. Hj. Siti Izzati Aziz | (Anggota) |
| 6. H. Lazuardi Erman, S.H | (Anggota) |

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP
RANPERDA APBD PERUBAHAN TAHUN 2024**



**Disampaikan Dalam Rapat Paripurna Dalam
Rangka Penyampaian
Pandangan Umum Fraksi :**

Kamis, 1 Agustus 2024

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yth.Sdr. Gubernur, Atau yang mewakili

Yth.Sdr. Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr. Sekretaris Daerah , Staf Ahli, Asisten, Kepala Badan, Dinas , Kantor
Dilingkup Provinsi Sumatera Barat

Yth.Sdr. Ketua-Ketua Fraksi, Rekan-Rekan dan Anggota DPRD Provinsi
Sumatera Barat.

Yth. Hadirin Yang Berbahagia

Pertama dan utama sekali marilah sama-sama panjatkan puji dan syukur
atas kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya,
pada siang hari ini kita kembali dapat hadir pada Rapat Paripurna Dalam
Rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda: **APBD
PERUBAHAN TAHUN 2024**

Sholawat & salam mari kita sampaikan kepada Junjungan kita Nabi besar
Muhammad SAW, karena atas kerja kerasnya umat manusia telah dapat keluar
dari lembah jahiliyah kepada kehidupan yang ber-adab.

Selanjutnya, pada kesempatan ini kami dari **Fraksi Partai Demokrat**,
menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tulus kami kepada
Gubernur Prov Sumatera Barat dan Tim yang telah Menyusun ranperda ini,
Hasilnya sudah sama-sama kita dengar Pembacaan Nota Pengantar dari
Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang telah dibacakan tadi. Selanjutnya kami
juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan DPRD, yang telah
memberikan kesempatan kepada **Fraksi Partai Demokrat**, untuk
menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap, Ranperda APBD Perubahan
Tahun 2024, sebelum diambil keputusan di tingkat Paripurna nanti.

Sdr. Gubernur dan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, hadirin dan hadirat yang Kami Hormati;

Berkaitan dengan substansi yang telah termuat dalam Laporan yang telah dibacakan tadi, kami **Fraksi Partai Demokrat** dapat menelaah terkait Ranperda APBD Perubahan Tahun 2024 dan juga ada tambahan sesuai yang ada dalam **Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat** untuk dijadikan pedoman serta catatan untuk Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perkenankan kami menyampaikan **Pandangan Umum, catatan dan saran dalam Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat** Sebagai berikut:

1. **Fraksi Partai Demokrat** mengapresiasi rencana kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini sesuai dengan prinsip dasar pendapatan, yaitu pemerintahan harus berupaya untuk menggali sumber pendapatan secara luas sehingga pendapatan daerah dapat terkumpul secara maksimal, semangat menggali pendapatan daerah jangan sampai membebani perekonomian masyarakat, Pemerintahan Provinsi Sumbar harus dapat membuka, membangun, memfasilitasi, dan mengembangkan usaha Masyarakat secara maksimal, apabila pendapatan Masyarakat meningkat, maka pendapatan daerah juga akan meningkat melalui pajak dan retribusi daerah. Perubahan yang terjadi pada PAD yang disebabkan oleh penyesuaian dengan perkembangan perekonomian dan ketentuan perundang- undangan serta perubahan pada pendapatan transfer. **Fraksi Demokrat** berharap bahwa Lembaga yang terkait dengan pendapatan agar terus menggali sumber-sumber pendapatan baru yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Langkah dan kebijakan yang di ambil oleh pemerintah Provinsi Sumbar harus di imbangi dengan kinerja yang maksimal, maka dari itu pengawasan dan evaluasi perlu ditingkatkan. Tentunya kita juga meminta Pemprov untuk menjelaskan strategi yang akan dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan, yang mana kemiskinan merupakan suatu kondisi Dimana merupakan salah satu acuan kemajuan suatu daerah.
3. Dalam upaya mengoptimalisasikan pajak dan retribusi daerah, Pemprov perlu melakukan pemetaan dan basis data, sehingga mendapatkan data yang akurat dan terkini, mohon penjelasan.
4. Perlu diketahui bahwa pendapatan asli daerah (PAD) Pada Ranperda perubahan APBD tahun 2024 direncanakan bertambah sebesar 3,394 triliun rupiah naik sebesar 8,84% atau sebesar 275,778 miliar rupiah dari target APBD awal senilai 3,118 triliun rupiah. Dalam kenaikan PAD ini masih bertumpu pada pendapatan pajak dan retribusi daerah. Tentunya Pemprov harus bisa menggali potensi lainya dalam meningkatkan PAD.
5. Melihat sumber pendapatan daerah pada Ranperda perubahan APBD tahun 2024, pendapatan transfer mengalami kenaikan sebesar 2,250 miliar rupiah sehingga menjadi 3,453 triliun rupiah, kami memandang adanya ketergantungan dana transfer dari pemerintahan pusat sangat besar, hal itu akan sangat berpengaruh pada kemampuan keuangan daerah, maka diperlukan adanya formulasi yang baik agar ketergantungan tersebut di imbangi dengan peningkatan pendapatan asli daerah.

6. Belanja daerah sebagai komponen ke uangan daerah, dalam kerangka ekonomi makro, diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan penambahan APBD tersebut tentunya dalam belanja juga diperhatikan efektivitas anggaran, dalam rangka melakukan efektivitas anggaran, Fraksi Demokrat Mengharapkan Pemprov Sumbar perlu melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan anggaran termasuk kepada Stakeholder dan Masyarakat, hal ini dikarenakan pelaksanaan sangat mendesak dan dapat berakibat pada kesalahan dalam laporan ke uangan dan lonjakan Silpa, apabila dana tidak terserap dikarenakan kegiatan tidak terlaksana.

7. Kami meminta aparat sipil negara (ASN) di Provinsi Sumatera Barat agar netral saat momen pemilihan kepala daerah Pada november 2024, untukantisipasi hal tersebut, Langkah apa yang dilaksanakn Eksekutif untuk menjaga netralitasnya.

Sdr. Gubernur dan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, hadirin dan hadirat yang Kami Hormati ;

Demikianlah beberapa hal Pandangan, Catatan dan Saran dari Pandangan Umum **Fraksi Partai Demokrat** terhadap :

APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

Dengan mengucapkan ***"Bismillahirrahmanirrahim"*** Ranperda APBD Perubahan Tahun 2024 tersebut dapat untuk dilanjutkan ketahapan selanjutnya dengan memperhatikan Pandangan, Catatan dan Saran yang kami bacakan diatas.

Terima Kasih,

Hormat kami,

Padang, 1, Agustus 2024

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua,

Sekretaris,

ALI TANJUNG

Hj. A I D A, SH

Wabillahi Taufik Wall Hidayah,

Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penasehat	: 1. H. Suwirpen Suib. S.Sos
Ketua	: 2. Ali Tanjung
Wakil Ketua	: 3. Suharjono. SE
Sekretaris	: 4. Hj. Aida. SH
Bendahara	: 5. Jefri Masrul. SE
Anggota	: 6. H. M. Nurnas, ST
	7. Ir.H.Arkadius.Dt. Intan Bano. MM. MBA
	8. H. Ismet Amzis. SH
	9 .H. Irzal Ilyas Dt. Lawik Basa. MM



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No 87 Padang Utara



PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
PERUBAHAN TAHUN 2024**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Yth: Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Yth: Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Yth: Saudara Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat

Yth: Saudara-saudara anggota Forum komunikasi pimpinan daerah

Yth: Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat

Yth: Saudara Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat

Yth: Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Pimpinan BUMN dan BUMD, Pimpinan Ormas, Partai Politik, LSM, wartawan dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama kami ingin mengajak kita semua untuk senantiasa mengucapkan puji syukur atas nikmat Allah SWT, serta memuji dan memujanya karna telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini pada acara rapat paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat. *Shalawat* serta salam semoga senantiasa tercurah kepada *uswah hasanah* kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, *Amin..*



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No 87 Padang Utara



Saudara Gubernur, Pimpinan, Anggota Dewan dan Hadirin yang berbahagia

Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pada pasal Pasal 161 ayat (2) menyebutkan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa.

Pada hari Rabu 31 Juli 2024 Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan Nota pengantar atas perubahan APBD 2024. Terlebih dahulu pada tanggal 27 Juli 2024 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menandatangani nota kesepakatan bersama atas KUPA-PPAS tahun 2024.

Pada perubahan APBD 2024 bahwa proyeksi pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 290.875.431.387 atau meningkat sebesar 4,42% sehingga perubahan pendapatan APBD 2024 sebesar Rp 6,877 T, disisi lain terdapat juga proyeksi kenaikan belanja daerah sebesar Rp. 219,878 Miliar, sehingga menyebabkan defisit APBD sebanyak 160,447 Miliar.

Fraksi PKS berterimakasih kepada pemerintah daerah yang sudah berupaya maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan 3,5 tahun ini, tentu ini tidak mudah, terus ada perbaikan-perbaikan dalam tata pemerintahan Sumatera Barat, ini adalah usaha dalam mewujudkan visi pemerintah daerah untuk Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan.

Saudara Gubernur, Pimpinan, Anggota Dewan dan Hadirin yang berbahagia



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No 87 Padang Utara



Setelah membaca dan mendiskusikan Nota Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2024, dan setelah kami menelaah beberapa hal yang melatarbelakangi pengajuan Nota Pengantar Rancangan APBD Perubahan 2024 ini, Fraksi PKS mempunyai beberapa pandangan yang akan disampaikan diantaranya :

1. Ditinjau dari kondisi umum pendapatan daerah pada semester 1 ini terlihat cukup signifikan progres capaian pendapatan daerah, baik dari PAD yang baru terealisasi sebesar 43,25%, pendapatan transfer, 48,48% untuk Pendapatan lain-lain daerah yang sah 2,95%. perlu Langkah pemprov dalam memenuhi target realisasi pendapatan di semester II ini.
2. Fraksi PKS mendorong agar program-program yang menjadi urusan pelayanan dasar, non pelayanan dasar agar dapat dilaksanakan seoptimal mungkin, terutama fokus kepada renovasi fasilitas umum yang terdampak bencana walaupun semenjak 11 Mei 2024 kemacetan di jalan Padang lua , Malalak, Sicicin, dan Solok – Padang, Alhamdulillah jalan padang-bukittinggi via lembah anai sudah dapat dilalui mulai tanggal 21 Juli 2024 Pemprov yang cepat tanggap berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten kota.
3. Terhadap hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sudah mencapai realisasi 97%. Tentu hal ini jauh dapat ditingkatkan mengingat bahwa penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini adalah laba dari penyertaan modal kepada BUMD-BUMD yang dimiliki pemprov. Fraksi PKS mendorong dapat peningkatan kinerja BUMD dalam menambah deviden dalam peningkatan pendapatan asli daerah.
4. Melihat beban belanja yang di usulkan gubernur dalam rancangan Perubahan APBD 2024, FPKS melihat terlalu berat untuk bisa dilaksanakan, mulai SILPA kurang sebesar Rp. 70.9 M, kegiatan yang



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No 87 Padang Utara



melampaui waktu pelaksanaan APBD 2023 yang dibayar di Perubahan 2023, kegiatan yang sudah serah terima (BAST) namun belum dibayar, hutang kepada kab kota berupa bagi hasil pajak kendaraan bermotor yang harus ditunaikan. Maka dari itu FPKS mendorong kepada TAPD untuk benar benar selektif lagi menambah kegiatan di saat beban kewajiban sangat berat ini.

Saudara Gubernur, Pimpinan, Anggota Dewan dan Hadirin yang berbahagia

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami tanggap dari Nota Rancangan peraturan daerah tentang APBD Perubahan 2024. Besar harapan kami kiranya penjelasan dari Saudara Gubernur nantinya dapat membantu kami dalam proses pembahasan selanjutnya, harapan kami bisa berjalan dengan baik dan sukses, sesuai harapan serta mencapai sasaran.

Wabillahirtaufik wal hidayah, Wassalamualaikum, wr.wb.

Padang, 1 Agustus 2024 M
26 Muharram 1446 H
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
(Fraksi PKS)
DPRD Sumatera Barat

Juru Bicara

(**Drs.H.Nurfirman Wansyah, MM,Apt**)

Ketua

Sekretaris

Drs.H.Nurfirman Wansyah, MM,Apt.

Muhamad Ridwan, S.IP



PIDATO

PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN JAWABAN GUBERNUR
TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI
TERHADAP RANPERDA PERUBAHAN APBD TA. 2024
JUM'AT, 2 AGUSTUS 2024

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT.
YTH. SDR. WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT.
YTH. PIMPINAN PT. BANK NAGARI, PIMPINAN BUMD
YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI, PIMPINAN
OPD DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.
YTH. PARA WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Puji syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat hadir bersama-sama pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada siang hari ini, dengan acara " Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pandangan

Umum Fraksi-Fraksi atas 3 Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ".

Salawat beriring salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli `Ala Muhammad wa `Ala Ali Muhammad.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak/Ibu dan hadirin sekalian yang telah berkenan memenuhi undangan kami untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, pada hari ini, Jum'at tanggal 2 Agustus 2024 dengan acara " Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa dalam rangka Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, pada Rapat Paripurna DPRD kemaren, Kamis tanggal 1 Agustus 2024, Fraksi-Fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Dalam Pandangan Umum yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi tersebut, banyak tanggapan, saran dan masukan yang diberikan terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2024, terutama terkait dengan target dan pengelolaan pendapatan daerah serta alokasi belanja yang ditampung pada Perubahan APBD Tahun 2024.

Terkait dengan pengelolaan dan target pendapatan daerah, Fraksi-Fraksi menilai bahwa pendapatan daerah terutama dari pos PAD belum dikelola dengan maksimal. masih banyak potensi yang bisa ditingkatkan, baik dari sektor PKB, BBNKB, redistribusi dan pemanfaatan asset daerah.

Proyeksi pendapatan daerah yang diusulkan pada Perubahan APBD Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 6.5 triliun, masih jauh dari target yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu sebesar Rp. 7.1 triliun. Ini tentu berdampak pula terhadap penyediaan alokasi belanja yang akan digunakan untuk mewujudkan target kinerja pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

Memperhatikan masih banyaknya kebutuhan anggaran untuk menutup kekurangan dari alokasi belanja yang diusulkan dalam Perubahan APBD Tahun 2024, maka Fraksi-Fraksi mendorong Pemerintah Daerah dan OPD-OPD untuk mendalami kembali semua potensi penerimaan yang masih bisa ditingkatkan. Hal ini diperlukan, agar tidak terjadi rasionalisasi belanja besar-besaran dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 ini.

Sedangkan terkait dengan belanja daerah dan memperhatikan kondisi keuangan daerah yang semakin terbatas, Fraksi-Fraksi mendorong alokasi belanja dilakukan dengan sangat cermat, memperhatikan skala prioritas, kebutuhan mendesak, pembayaran hutang kepada pihak

ketiga serta capaian target kinerja yang masih jauh dari yang direncanakan.

Disamping itu, Fraksi-Fraksi juga mempertanyakan sudah sampai sejauhmana pelaksanaan dan dampak yang diberikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani program unggulan Pemerintah Daerah yaitu mengaokasikan anggaran sebesar 10 % untuk pertanian dari APBD Provinsi Sumatera Barat serta pelaksanaan program subsidi bunga bagi sektor UMKM yang anggarannya sudah 2 (dua) tahun tidak dapat direalisasikan.

Selain memberikan tanggapan dan pandangan terhadap sektor pendapatan dan belanja daerah, Fraksi-Fraksi juga mempertanyakan bagaimana keseriusan Pemerintah Daerah dalam pembenahan kinerja BUMD serta penyelesaian permasalahan pada BUMD tersebut, diantaranya permasalahan pasca likuidasi PT. Dinamika, permalahasan kinerja PT. Balairung dan PT. Dinamika.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembahasan Ranperda, terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi tersebut, akan diberikan pula jawaban dan/atau tanggapannya oleh Gubernur.

Berkenaan dengan hal dimaksud, tentunya Sdr. Gubernur telah menyiapkan jawaban dan/atau tanggapannya atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2024 tersebut.

Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur kami persilahkan.

.....
Penyampaian Jawaban Gubernur Atas PU Fraksi
Atas Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024
.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur yang telah menyampaikan Jawaban dan/atau tanggapannya

atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2024.

Dari jawaban dan/atau tanggapan yang disampaikan oleh Sdr. Gubernur tadi, secara umum telah dapat menjawab dan menjelaskan dari pertanyaan, pandangan dan pendapat yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi. Namun demikian, untuk lebih jelasnya akan kita dalami nanti dalam proses pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 yang akan dilakukan oleh DPRD Bersama Pemerintah Daerah.

Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Dengan telah disampaikannya jawaban dan/atau tanggapan Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, maka proses pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024, masuk pada tahap pembahasan pendahuluan oleh Komisi Bersama OPD dan dilanjutkan dengan pembahasan dan finalisasi oleh Badan Anggaran Bersama TAPD.

Memperhatikan kondisi Perubahan APBD Tahun 2024 yang masih belum kredibel dan belum seimbang antara

pendapatan dan kebutuhan belanja, maka kami mengharapkan kepada Komisi-Komisi dan Badan Anggaran untuk betul-betul melihat secara tajam, baik aspek pendapatan maupun belanja daerah.

Kita tentu tidak ingin karena keterbatasan anggaran, dilakukan refocusing besar-besaran terhadap rencana belanja termasuk kegiatan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRD. Perubahan APBD Tahun 2024, merupakan instrument terakhir bagi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat masa jabatan Tahun 2019-2024 untuk memperjuangkan aspirasi Masyarakat yang disampaikan kepada masing-masing Anggota. Oleh sebab itu, tentu kita harus maksimal dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD tahun 2024 nanti.

Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Dengan telah disampaikan jawaban dan/atau tanggapan Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, maka berakhir pulalah Rapat Paripurna kita pada hari ini.

sebelum Rapat Paripurna ini kami tutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf, apabila dalam pelaksanaan rapat paripurna ini terdapat hal-hal yang tidak pada tempatnya.

Akhirnya, dengan mengucapkan “Alhamdulillahilabbilamin” Rapat Paripurna pada hari ini dalam rangka Penyampaian Jawaban dan/atau Tanggapan Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2024, secara resmi kami tutup.

..... (ketukan palu 3x)

Terima kasih.

Billahitaufiq walhidayah

Wss. Wr. Wb



GUBERNUR SUMATERA BARAT

**JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

JUM'AT, 2 AGUSTUS 2024

=====

**ASSALAMU'ALAIKUM WA RAHMATULLAHI WA
BARAKATUHUH.**

YTH. KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT.

YTH. PIMPINAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT.

YTH. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN,
KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN
KEPALA BIRO DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT.

YTH. KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN
NEGARA (KPPN) PADANG.

YTH. REKAN-REKAN PERS, UNDANGAN DAN HADIRIN
YANG BERBAHAGIA.

MENGAWALI PENYAMPAIAN NOTA JAWABAN INI, PERKENANKANLAH KAMI MENGAJAK HADIRIN MENGUCAPKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT ATAS SEGALA LIMPAHAN RAHMAT DAN HIDAYAH-NYA. SELANJUTNYA SHALAWAT DAN SALAM BAGI NABI BESAR JUNJUNGAN KITA MUHAMMAD SHALALLAHU 'ALAIHI WASSALAM.

MENGAWALI PIDATO INI, PERKENANKANLAH KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD YANG TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KAMI UNTUK MENYAMPAIKAN JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP RANPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT PADA TANGGAL 1 AGUSTUS 2024 KEMARIN.

SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN YANG TERHORMAT.

SETELAH MEMBACA DAN MENYIMAK PANDANGAN UMUM DARI FRAKSI-FRAKSI DPRD, KAMI MELIHAT BAHWA KESELURUHAN MASUKAN, USULAN DAN

SARAN SERTA PERTANYAAN YANG DISAMPAIKAN BERTUJUAN UNTUK PENYEMPURNAAN ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TELAH KITA SEPAKATI BERSAMA DALAM PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) SERTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN 2024, YANG DILANDASI DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN RAKYAT.

SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN.

SELANJUTNYA SEBELUM KAMI MENYAMPAIKAN NOTA JAWABAN INI, TERLEBIH DAHULU KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH ATAS PANDANGAN, APRESIASI DAN KRITIK YANG KONSTRUKTIF YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH 7 (TUJUH) FRAKSI DPRD. SEMOGA HAL INI LEBIH MEMACU KITA UNTUK TERUS MEMPERBAIKI DIRI DI MASA DEPAN. BERKAITAN DENGAN HAL TERSEBUT, PADA KESEMPATAN YANG TERBATAS INI IZINKAN KAMI MENYAMPAIKAN TANGGAPAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRASI DPRD SEBAGAI BERIKUT.

**SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN SERTA
HADIRIN YANG TERHORMAT.**

MENJAWAB PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI
GERINDRA, DAPAT KAMI SAMPAIKAN HAL-HAL
SEBAGAI BERIKUT:

1. MENGENAI KAPASITAS FISKAL, DIMANA
TERDAPAT DEFISIT SEBESAR RP160,447 MILIAR.
HAL INI DAPAT DIJELASKAN BAHWA DENGAN
PENDAPATAN DAERAH SEBESAR RP6.877
TRILIUN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DARI
SILPA TAHUN 2023 SEBESAR RP180,477 MILIAR
MAKA PENERIMAAN MENJADI SEBESAR RP7,057
TRILIUN, YANG DIALOKASIKAN PADA BELANJA
DAERAH SEBESAR RP7,037 DAN SISANYA PADA
PENYERTAAN MODAL KEPADA BANK NAGARI
SEBESAR RP20 MILIAR. SEHINGGA DENGAN
DEMIKIAN APBD KITA TETAP BERADA DALAM
KEADAAN BERIMBANG WALAUPUN DEFISIT
SEBESAR RP160,447 TETAPI BISA DITUTUPI
DENGAN PEMBIAYAAN NETTO.

SESUAI DENGAN PMK 84 TAHUN 2023 TENTANG
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH, DIMANA
KAPASITAS FISKAL SUMATERA BARAT
BERKATEGORI RENDAH DENGAN MAKSIMAL

DEFISIT APBD SEBESAR 4,35% (EMPAT KOMA EMPAT LIMA PERSEN) DARI PERKIRAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 YAKNI MAKSIMAL SEBESAR RP299,169 MILIAR;

2. TERHADAP PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH DALAM PERUBAHAN APBD TAHUN 2024 YANG MASIH RENDAH DARI TARGET RPJMD, DAPAT DIJELASKAN BAHWA PENETAPAN TARGET PAD INI, TELAH DIHITUNG SECARA CERMAT DAN SEKSAMA MENGGUNAKAN METODOGI YANG RASIONAL DAN TERUKUR. DALAM PROSES PENGHITUNGAN, PEMERINTAH DAERAH TELAH MEMPEDOMANI DATA POTENSI SERTA MEMPERTIMBANGKAN PARAMETER LAIN YANG BERPENGARUH. TERJADINYA PERBEDAAN DENGAN PROYEKSI RPJMD TENTU TIDAK TERLEPAS DARI PERUBAHAN ASUMSI-ASUMSI YANG TERUS BERUBAH DAN DINAMIS DARI TAHUN KE TAHUN.
3. TERHADAP PERLUNYA LANGKAH-LANGKAH TAKTIS DAN STRATEGIS SEBAGAI BENTUK LAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK, KAMI SEPENDAPAT DENGAN PERNYATAAN FRAKSI PARTAI GERINDRA UNTUK MEBERIKAN PELAYANAN TERBAIK TELAH DILAKUKAN INOVASI

PENGEMBANGAN APLIKASI E-SAMSAT UNTUK MEMPERMUDAH MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK, SEPERTI SAMSAT ONLINE/SAMSAT ANYWHERE, SIGNAL, PEMBAYARAN MELALUI ATM SERTA PENAMBAHAN PAYMENT POINT.

4. MENGENAI PERKEMBANGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI DI LINGKUNGAN PEMPROV. SUMATERA BARAT TERKAIT LAYANAN BAGI WAJIB PAJAK, DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA, PEMERINTAH PROVINSI TELAH MENYEDIAKAN LAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN SECARA ONLINE DENGAN APLIKASI SIGNAL. DENGAN APLIKASI INI PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN MUDAH, KAPAN SAJA DAN DIMANA SAJA PADA PERANGKAT ANDROID MASING-MASING.
5. TERHADAP INFORMASI ADANYA PERBEDAAN DATA JUMLAH KENDARAAN YANG ANTARA BAPENDA PROVINSI SUMBAR, BPS DAN DIRLANTAS POLDA SUMBAR, DAPAT DIJELASKAN PERBEDAAN INI TERJADI KARENA PERBEDAAN META DATA DI MASING-MASING DATABASE. UNTUK DATABASE KITA KENDARAAN YANG TERDATA MERUPAKAN KENDARAAN YANG SUDAH

TERDAFTAR SEMENJAK PULUHAN TAHUN YANG LALU YANG TERUS BERTAMBAH SETIAP WAKTU. UPDATING DATA KENDARAAN TERKENDALA OLEH SULITNYA PROSES PENGHAPUSAN DATA KENDARAAN YANG HILANG, HANCUR, RUSAK BERAT DAN SEBAGAINYA, YANG MEMBUTUHKAN BANYAK KLARIFIKASI. DAN KEENGGANAN MASYARAKAT UNTUK MELAPORKAN KENDARAAN MEREKA.

6. TERKAIT DENGAN CAPAIAN PENDAPATAN DAERAH DARI SISI PEMANFAATAN IDLE ASSET, DAPAT DIJELASKAN SEBAGAI BERIKUT:

- a. PEMERINTAH PROVINSI TELAH MELAKUKAN INVENTARISASI ASET TETAP YANG DAPAT MENGHASILKAN KONTRIBUSI BAGI PAD.
- b. ASET-ASET YANG BERKONTRIBUSI TERHADAP PAD TERSEBUT SEBAGIAN BESAR TELAH DIKERJASAMAKAN DENGAN PIHAK LAIN DALAM BENTUK SEWA MAUPUN KERJASAMA BMD.
- c. PEMERINTAH DAERAH SEDANG MELAKUKAN PROSES LELANG KERJASAMA SEWA ASET-ASET EKS. NOVOTEL, BALAI SIDANG BUNG HATTA DAN HOTEL PAVILIUN. SESUAI HASIL

APPRAISAL, NILAI LIMIT SEWA UNTUK PAKET PENAWARAN INI ADALAH RP. 8 MILYAR PER TAHUN. SAAT INI TELAH DILAKUKAN PROSES ANWIZING KEPADA 13 PEMINAT.

d. DI SAMPING ITU PROSES BEBERAPA OBJEK SEWA LAINNYA JUGA SEDANG TETAP BERJALAN.

7. MENGENAI PERNYATAAN BAHWA SALAH SATU LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN PEMPROV UNTUK MENUTUP DEFISIT DENGAN MELAKUKAN PENGELOLAAN ASSET DENGAN BAIK, DAPAT DIJELASKAN SEBAGAI BERIKUT:

a. PADA TAHUN 2023 TERHADAP PT. GRAFIKA JAYA SUMBAR TELAH DILAKUKAN PERGANTIAN MANAJEMEN DAN SEDANG DIDORONG UNTUK MELAKUKAN RESTRUTURISASI. DAMPAK DARI KEBIJAKAN INI, TERJADI PERBAIKAN KINERJA SEHINGGA DAPAT MEMBUKUKAN LABA SEBESAR RP240.239.393,90.

b. PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR SEDANG DALAM PROSES PELAKSANAAN

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA YANG
DIPILIH SECARA *BEAUTY CONTEST*.

- c. SEMENTARA ITU, UNTUK BUMD LAINNYA
SEPERTI PT. BANK NAGARI DAN PT.
JAMKRIDA SUMBAR TERUS
MENUNJUKKAN PENINGKATAN LABA DAN
TELAH BERKONTRIBUSI MELALUI
PEMBAGIAN DEVIDEN KEPADA DAERAH.
8. SELANJUTNYA KAMI MENGUCAPKAN TERIMA
KASIH DAN MENYAMBUUT BAIK SARAN DARI
FRAKSI PARTAI GERINDRA AGAR PEMERINTAH
DAERAH MELALUI TAPD TAAT DAN DISIPLIN
MENJADIKAN BESARAN BELANJA MODAL
SESUAI DENGAN TARGET RPJMD. HAK INI
SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HKPD YANG
MENGHARUSKAN BELANJA INFRASTRUKTUR
PUBLIK MIJIMAL SEBESAR 40%. MOHON
DUKUNGAN KITA BERSAMA.
9. TERHADAP SEJAUHMANA DAMPAK ALOKASI
ANGGARAN 10 PERSEN UNTUK MENINGKATKAN
PENDAPATAN PETANI YANG DILAKUKAN SEJAK
2021 HINGGA 2024 INI, DAPAT KAMI JELASKAN
BAHWA TELAH TERJADI PENINGKATAN

PENDAPATAN PETANI YANG DILIHAT DARI KENAIKAN NILAI TUKAR PETANI (NTP). TAHUN 2021 RATA-RATA NTP SEBESAR 107,61; TAHUN 2022 MENINGKAT MENJADI 108,81; TAHUN 2023 MENINGKAT MENJADI 109,59 DAN DI TAHUN 2024 RATA-RATA NTP SAMPAI DENGAN BULAN JUNI MENINGKAT CUKUP SIGNIFIKAN MENCAPAI 121,11.

10. MENGENAI LAPORAN TERKAIT INFRASTRUKTUR YANG BELUM MEMADAI, MISALNYA JALAN DI TALAMAU PASAMAN DAN ALIRAN SUNGAI BATANG SUMPUR YANG MEMERLUKAN PENANGANAN DAPAT DIJELASKAN BAHWA PEMERINTAH PROVINSI SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA MELAKSANAKAN PENANGANAN JALAN PROVINSI YANG BERADA DI TALAMAU PASAMAN YAITU RUAS JALAN PANTI – SIMPANG EMPAT (P.031). SAAT INI SEDANG DILAKSANAKAN PEKERJAAN FISIK SEBANYAK 2 PAKET PEKERJAAN DENGAN NILAI KONTRAK RP 9,6 MILYAR DAN RP 12,4 MILYAR DENGAN PROGRES FISIK SAAT MENCAPAI 60%. PENYELESAIAN 2 PAKET PEKERJAAN INI AKAN

MENYELESAIKAN PERMASALAHAN JALAN
RUSAK DI KAWASAN TALAMAU PASAMAN.

11. TERKAIT PROGRAM SIMAMAK DAPAT
DISAMPAIKAN BAHWA PROGRAM INI SEJAK
BULAN JUNI 2024 TELAH DIREALISASIKAN
SECARA BERTAHAP. KAMI BERTERIMA KASIH
KEPADA FRAKSI GERINDRA YANG SELALU
MENGAWAL PROGRAM INI.

LANGKAH YANG DILAKUKAN UNTUK
MEWUJUDKAN PROGRAM SIMAMAK INI
ADALAH:

1. MENERBITKAN 2 (DUA) PERATURAN
GUBERNUR, YAITU :

a. PERGUB NO. 23 TAHUN 2023 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
SUBSIDI

b. PERGUB NO. 39 TAHUN 2023 TENTANG
PENUGASAN KEPADA PT. BANK
NAGARI DALAM PENYALURAN SUBSIDI
BUNGA/ MARGIN PADA USAHA KECIL

2. PENGESAHAN MELALUI RUPS BANK
NAGARI.

3. MEMBUAT PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DINAS TERKAIT DENGAN BANK NAGARI PADA TANGGAL 15 MEI 2024.
4. MENSOSIALISASIKAN PROGRAM SIMAMAK.
5. SELEKSI CALON PENERIMA PROGRAM SIMAMAK OLEH BANK NAGARI.
6. DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI MENCAIRKAN PROGRAM SIMAMAK SESUAI PERMINTAAN BANK NAGARI.

DEMIKIANLAH TANGGAPAN YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN ATAS PANDANGAN UMUM YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI PARTAI GERINDRA.

SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN YANG TERHORMAT.

MENJAWAB PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA, DAPAT KAMI SAMPAIKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

1. ATAS MASUKANNYA TERHADAP PERLUNYA LANGKAH PEMPROV DALAM MEMENUHI TARGET REALISASI PENDAPATAN DI SEMESTER II INI

DITINJAU DARI KONDISI UMUM PENDAPATAN DAERAH PADA SEMESTER I INI, KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH DAN KAMI SEPENDAPAT DENGAN PANGANGAN FRAKSI PKS TERSEBUT.

2. TERKAIT HARAPAN AGAR RENOVASI FASILITAS UMUM YANG TERDAMPAK BENCANA. UNTUK DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA, DAPAT KAMI JELASKAN, BAHWA JALAN PADANG-BUKITTINGGI VIA LEMBAH ANAI SUDAH DAPAT DILALUI MULAI TANGGAL 21 JULI 2024, HAL INI TIDAK TERLEPAS DARI SINERGI OPTIMAL ANTARA PEMPROV, PEMERINTAH PUSAT DAN KABUPATEN/KOTA. KE DEPAN, KAMI MOHON DUKUNGAN FRAKSI PKS DAN SELURUH FRAKSI-FRAKSI DPRD AGAR FOKUS ANGGARAN KITA DIARAHKAN KEPADA PERBAIKAN INRASTRUKTUR YANG RUSAK AKIBAT BENCANA, SEHINGGA EKONOMI MASYARAKAT DAPAT MENINGKAT KEMBALI.
3. TERHADAP CAPAIAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN YANG MASIH PERLU UNTUK DITINGKATKAN KAMI UCAPAKAN TERIMA KASIH ATAS MASUKANNYA. PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SEPAKAT UNTUK SELALU MENDORONG KINERJA BUMD DALAM MENAMBAH

DEVIDEN UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.

4. SELANJUTNYA KAMI SEPAKAT DENGAN PERSPEKTIF FRAKSI PKS YANG MEMANDANG BEBAN BELANJA DALAM RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2024 TERLALU BERAT UNTUK BISA DILAKSANAKAN, SEHINGGA KEPADA TAPD DISARANKAN UNTUK BENAR-BENAR SELEKTIF DALAM MENAMBAH KEGIATAN.

DEMIKIANLAH TANGGAPAN YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN ATAS PANDANGAN UMUM YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA.

SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN YANG TERHORMAT.

MENJAWAB BEBERAPA PERTANYAAN DAN TANGGAPAN DARI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DAPAT KAMI SAMPAIKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

1. KAMI BERTERIMA KASIH ATAS APRESIASI YANG DIBERIKAN OLEH FRAKSI PARTAI DEMOKRAT ATAS USULAN KENAIKAN PAD DALAM RANGANGAN PERUBAHAN APBD TA. 2024 INI

KARENA TELAH SESUAI DENGAN PRINSIP DASAR PENDAPATAN, YAITU MENGGALI SUMBER PENDAPATAN SECARA LUAS SEHINGGA PENDAPATAN DAERAH DAPAT TERKUMPUL SECARA MAKSIMAL, TANPA MEMBEBANI EKONOMI MASYARAKAT.

2. TERKAIT STRATEGI YANG AKAN DILAKUKAN UNTUK MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN, DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA UPAYA PENURUANN ANGKA KEMISKINAN AKAN DITEMPUH DENGAN 3 STRATEGI:

- a. MENURUNKAN BEBAN PENGELUARAN MASYARAKAT TERUTAMA PADA KELOMPOK BERPENGHASILAN RENDAH
- b. MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT.
- c. MEMINIMALKAN KANTONG-KANTONG KEMISKINAN.

3. TERKAIT SARAN SAUDARA AGAR PEMPROV MELAKUKAN PEMETAAN DAN BASIS DATA TERKAIT PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA DALAM RANGKA OPTIMALISASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, TELAH DILAKUKAN PEMETAAN POTENSI GUNA MENGUKUR KEMUNGKINAN REALISASI

PENERIMAAN SERTA MENJADI DASAR PENYUSUNAN KEBIJAKAN. UPDATING DATA JUGA SECARA KONTINYU TERUS DILAKUKAN GUNA MEMINIMALISIR KESALAHAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN.

4. KAMI SEPENDAPAT DENGAN PANDANGAN DAN HARAPAN SAUDARA AGAR PEMPROV HARUS BISA MENGGALI POTENSI LAINYA DALAM MENINGKATKAN PAD. HAL INI DISEBABKAN KARENA PORSI UTAMA DARI PAD KITA YANG MASIH BERTUMPU PADA PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH. ATAS MASUKANNYAN KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH.
5. SEHUBUNGAN DENGAN PANDANGAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT BAHWA APBD KITA SANGAT BERGANTUNG PADA DANA TRANSFER PEMERINTAHAN PUSAT MEMANG DEMIKIANLAH KONDISINYA SAAT INI. KAMI SETUJU DENGAN SAUDARA BAHWA KITA PERLU MERUMUSKAN FORMULASI YANG LEBIH BAIK AGAR KETERGANTUNGAN TERSEBUT DIIMBANGI DENGAN PENINGKATAN PAD.
6. TERHADAP HARAPAN FRAKSI DEMOKRAT AGAR PEMPROV SUMBAR PERLU MELAKUKAN

PENGAWASAN KETAT TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN TERMASUK KEPADA STAKEHOLDER DAN MASYARAKAT, DAPAT DIJELASKAN BAHWA PEMPROV TELAH MELAKUKAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DENGAN BERBAGAI UPAYA, SEPERTI MELAKUKAN RAPAT KOORDINASI, MONEV PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, SERTA MENGEMBANGKAN APLIKASI SIMBANGDA BERBASIS EVIDENCE, GUNA MEMINIMALISIR ADANYA PEKERJAAN YANG TIDAK TERLAKSANA (TIDAK DILAKSANAKAN, PUTUS KONTRAK, BELUM TERBAYARKAN, MAUPUN MELEWATI TAHUN ANGGARAN).

7. TERKAIT PERMINTAAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT AGAR ASN DI PROVINSI SUMATERA BARAT NETRAL SAAT MOMEN PEMILIHAN KEPALA DAERAH, DAPAT DIJELASKAN TERKAIT NETRALITAS ASN PEMERINTAH PROVINSI TELAH MENGAMBIL BEBERAPA LANGKAH SEBAGAI BERIKUT:

a. PENERBITAN SURAT EDARAN NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN APARATUR SIPIL NEGARA

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024.

- b. PEMBACAAN IKRAR NETRALITAS PEGAWAI APARTUR SIPIL NEGARA DAN PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS DI SETIAP SKPD.
- c. PENINGKATAN KESADARAN DAN EDUKASI, MELALUI SOSIALISASI TENTANG PENTINGNYA NETRALITAS ASN DALAM PILKADA.
- d. PENEGAKAN DISIPLIN DAN PEMBERIAN SANKSI TEGAS BAGI ASN YANG MELANGGAR NETRALITAS

DEMIKIANLAH TANGGAPAN YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN ATAS PANDANGAN UMUM YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI PARTAI DEMOKRAT.

SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN YANG TERHORMAT.

TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL, DAPAT KAMI SAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT:

1. SEHUBUNGAN DENGAN KINERJA PENCAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN DAPAT KAMI SAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT :
 - a. PERTUMBUHAN EKONOMI SUMATERA BARAT PADA TAHUN 2021 SEBESAR 3,29% PADA TAHUN 2022 NAIK MENJADI SEBESAR 4,36% DAN PADA TAHUN 2023 MENJADI 4,61%. SEMUA REALISASI TELAH MELAMPAUI TARGET RPJMD.
 - b. TINGKAT PENGANGGURAN PROVINSI SUMATERA BARAT PADA TAHUN 2021 SEBESAR 6,52%, TAHUN 2022 TURUN MENJADI 6,28% DAN TAHUN 2023 KEMBALI TURUN MENJADI 5,94%. UNTUK KONDISI BULAN FEBRUARI 2024 TINGKAT PENGANGGURAN TERUS MEMBAIK DIANGKA 5,79%. KONDISI INI JUGA MELAMPAUI TARGET YANG DITETAPKAN DALAM RPJMD.
 - c. TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI SUMATERA BARAT PADA TAHUN 2021 SEBESAR 6,04%, TAHUN 2022 TETAP DIANGKA 6,04% DAN PADA TAHUN 2023 TURUN MENJADI 5,95%. UNTUK KONDISI BULAN MARET 2024 TINGKAT

KEMISKINAN SEDIKIT MENINGKAT MENJADI 5,97% YANG DISEBABKAN TERJADINYA BENCANA SEJAK DESEMBER 2023 CUKUP MENGANGGU TERHADAP AKTIVITAS EKONOMI MASYARAKAT. NAMUN KONDISI KEMISKINAN INI JUGA LEBIH BAIK DARI TARGET YANG DITETAPKAN DALAM RPJMD.

- d. KEMISKINAN EKSTREM DI PROVINSI SUMATERA BARAT PADA TAHUN 2021 SEBESAR 0,91% ATAU SEBANYAK 50.842 Jiwa DAN PADA TAHUN 2023 TURUN MENJADI 0,41% ATAU 23.253 Jiwa. KONDISI KEMISKINAN EKSTREM INI JUGA LEBIH BAIK DARI TARGET YANG DITETAPKAN DALAM RPJMD.
- e. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) PROVINSI SUMATERA BARAT PADA TAHUN 2021 SEBESAR 74,56, TAHUN 2022 MENJADI 75,16 MERUPAKAN RANGKING 9 SECARA NASIONAL DAN PADA TAHUN 2023 SEMAKIN MEMBAIK DENGAN IPM SEBESAR 75,64 YANG MERUPAKAN RANGKING 7 SECARA NASIONAL DIMANA CAPAIAN INI JUGA LEBIH BAIK DARI CAPAIAN RPJMD

f. ANGKA GINI RATIO TAHUN 2021 ADALAH SEBESAR 0,300 DAN PADA TAHUN 2023 MENJADI 0,280 (NOMOR 3 TERBAIK SECARA NASIONAL). CAPAIAN INI JUGA LEBIH BAIK DARI CAPAIAN RPJMD

2. SEHUBUNGAN TARGET KONTRIBUSI PERTUMBUHAN SEKTOR PERTANIAN DAPAT KAMI JELASKAN PADA TAHUN 2021 PDRB SEKTOR PERTANIAN SEBESAR RP38,82 TRILYUN DENGAN KONTRIBUSI TERHADAP EKONOMI SUMBAR SEBESAR 22,18%, KEMUDIAN DI TAHUN 2023 MENINGKAT MENJADI RP.41,61 T DENGAN KONTRIBUSI TERHADAP EKONOMI SUMBAR SEBESAR 21,78%. PROYEKSI TAHUN 2024 PDRB SEKTOR PERTANIAN AKAN BERADA PADA ANGKA Rp42 – RP. 42,5 TRILYUN DENGAN KONTRIBUSI TERHADAP PEREKONOMIAN SUMBAR DI ANGKA 21% – 22%.

MENGENAI INFLASI DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA PADA KONDISI BULAN MAI 2024, AKIBAT BENCANA ALAM INFLASI SUMATERA BARAT MENINGKAT MENCAPAI 4,17% KEMUDIAN PADA

JUNI MENURUN MENJADI 4,03% DAN DI JULI 2024 KITA SUDAH BERHASIL MENGENDALIKAN KONDISI HARGA-HARGA BAHAN POKOK SEHINGGA INFLASI MENURUN MENJADI 2,44%. PERLU KAMI INFORMASIKAN JUGA BAHWA DARI DATA BPS RATA-RATA NILAI TUKAR PETANI (NTP) JUGA JAUH MENINGKAT, DIMANA RATA-RATA NTP KONDISI SEMESTER 1 TAHUN 2023 SEBESAR 107,84% DAN MENINGKAT CUKUP SIGNIFIKAN PADA SEMESTER 1 TAHUN 2024 MENJADI SEBESAR 121,11%. KONDISI INI MENGAMBARKAN ADANYA PERBAIKAN KESEJAHTERAAN TERHADAP PETANI DI SUMATERA BARAT.

3. SEHUBUNGAN DENGAN MENGATASI ISU-ISU STRATEGIS, SEPERTI IPM, PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PENGANGGURAN, KESENJANGAN WILAYAH, LINGKUNGAN HIDUP, INFRASTRUKTUR DAN KETAHANAN PANGAN PADA PERUBAHAN ANGGARAN 2024 INI DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA PRIORITAS PEMBANGUNAN DI PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024 INI TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN

SEBAGAIMANA KONDISI AWAL TAHUN 2024
DENGAN 7 PRIORITAS YAITU :

- a. PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA,
SEHAT, UNGGUL DAN BERDAYA SAING
 - b. PENINGKATAN TATA KEHIDUPAN SOSIAL
KEMASYARAKATAN BERDASARKAN ABS-SBK
 - c. PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN
PRODUKTIFITAS PERTANIAN, PERKEBUNAN,
PETERNAKAN DAN PERIKANAN
 - d. PENINGKATAN USAHA PERDAGANGAN DAN
INDUSTRI KECIL/MENENGAH SERTA
EKONOMI BERBASIS DIGITAL
 - e. PENINGKATAN EKONOMI KREATIF DAN
BERDAYA SAING KEPARIWISATAAN
 - f. PENINGKATAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR YANG BERKEADILAN DAN
BERKELANJUTAN
 - g. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA
PEMERINTAHAN DAERAH
4. MENGENAI PENJELASAN TENTANG STRATEGI
PEMERINTAH DAERAH DALAM MERAUP
PENDAPATAN PADA RUMAH SAKIT YANG MASIH
TERKENDALA DI BANYAK HAL, BAIK
ADMINISTRASI MAUPUN FASILITAS, DAPAT

DIJELASKAN BAHWA PEMERINTAH DAERAH TELAH MELAKUKAN UPAYA-UPAYA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ANTARA LAIN:

- a) MENINGKATKAN LAYANAN YANG ADA DI RUMAH SAKIT.
- b) MENGOPTIMALKAN PROGRAM RUMAH SAKIT JEJARING KJSU-KIA.
- c) PEMANFAATAN POTENSI LAIN RUMAH SAKIT SEPERTI PARKIR DAN SEWA GEDUNG.
- d) PENGEMBANGAN KAPASITAS LAYANAN.
- e) PENINGKATAN LAYANAN IT RUMAH SAKIT.

5. TERKAIT PENDAPATAN RETRIBUSI JASA USAHA DARI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DI UPTD LB3M DLH PROVINSI SUMATERA BARAT, DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA SEJAK JUNI 2023 PENGOLAHAN LIMBAH B3 MEDIS (INCENERATOR) SUDAH TIDAK OPERASIONAL YANG DISEBABKAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA DICABUT OLEH KLHK. KEMUDIAN PADA APRIL 2024 UPTD LB3M DINAS LH SUDAH MEMPEROLEH SEMUA PERIZINAN YANG DI PERSYARATKAN, NAMUN KENDALA SAAT INI ADALAH UNIT INCENRATOR TERSEBUT MENGALAMI KERUSAKAN SEHINGGA MEMERLUKAN PERBAIKAN YANG

DIANGGARKAN PADA APBD PERUBAHAN 2024, SEHINGGA DI PERKIRAKAN BARU AKAN OPERASIONAL PADA BULAN DESEMBER 2024.

6. SELANJUTNYA TERHADAP PEMBENTUKAN SILPA YANG LEBIH KECIL DARI PROYEKSI, DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA SILPA, ADALAH SELISIH LEBIH REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN SELAMA SATU PERIODE ANGGARAN. JIKA DILIHAT DALAM LKPD AUDITED, SILPA TAHUN 2023 ADALAH SEBESAR 180.447.544.425,19 DARI YANG DITARGETKAN RP. 251.444.175.049. SALAH SATU PENYEBABNYA ADALAH RENDAHNYA CAPAIAN PAJAK DAERAH YAITU SEBESAR RP. 2.236.722.695.545,00 DARI PAGU ANGGARAN SEBESAR RP. 2.463.434.564.594 ATAU CAPAIAN PAJAK HANYA 90,80 %.

7. BERKENAAN DENGAN PERMINTAAN PENJELASAN TERKAIT DEFISIT PEMBELANJAAN DAERAH DAN SOLUSI LAIN SELAIN MENUTUPINYA DENGAN PEMBIAYAAN NETTO, DAPAT DIJELASKAN BAHWA SELAIN

PEMBIAYAAN NETTO, SOLUSI YANG DAPAT DIPAKAI UNTUK MENUTUPI DEFISIT ADALAH DENGAN MENAIKKAN PENDAPATAN DAERAH, MELAKUKAN RASIONALISASI BELANJA ATAU MELAKUKAN PENYESUAIAN KEMBALI KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN DAN TERAKHIR DENGAN UTANG.

8. SELANJUTNYA TERKAIT PENJELASAN KEADAAN MAKRO DAERAH, SEPERTI ANGKA PENGANGGURAN TERBUKA DAN SOLUSI APA YANG BISA DI LAKUKAN DALAM WAKTU KASIB INI, SECARA UMUM TELAH KAMI JELASKAN SEBELUMNYA PADA PERTANYAAN NOMOR 1 DI ATAS.
9. SELANJUTNYA ATAS PERTANYAAN PENYEBAB SILPA YANG DI HARAPKAN SEMULA TERNYATA BERKURANG, TELAH DIJELASKAN PADA JAWABAN PERTANYAAN NOMOR 6.
10. MENGENAI DAMPAK BENCANA ALAM YANG MEMBUTUHKAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA KHUSUSNYA AKSES JALAN DI LEMBAH ANAI DAPAT DIJELASKAN PASCA BENCANA TERSEBUT JALAN PADANG MENUJU BUKITTINGGI DILEMBAH ANAI TELAH PERBAIKI

OLEH BALAI JALAN NASIONAL DENGAN PROGRES FISIK SAAT INI TELAH MENCAPAI 50%. RUAS JALAN INI TELAH BISA DILALUI OLEH KENDARAAN SECARA TERBATAS DAN DIRENCANAKAN SELESAI PADA BULAN OKTOBER 2024.

11. TERKAIT DENGAN PERUBAHAN REGULASI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA SESUAI DENGAN HIERARKHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERDA DAN PERATURAN GUBERNUR TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN ATURAN YANG LEBIH TINGGI. KARENA ITU PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR PERLU DIHARMONISASIKAN DAN DISELARASKAN SEHINGGA PERLU DIEVALUASI. DISAMPING UNTUK MELIHAT ATAU MENGAJI KESELARASAN DAN KESESUAIAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI, EVALUASI JUGA BERTUJUAN UNTUK MELIHAT BAGAIMANA IMPLEMENTASI ATAU PENERAPAN PRODUK HUKUM DAERAH TERSEBUT.

12. TERKAIT DENGAN PENURUNAN BELANJA PEGAWAI REALISASI AKTUAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PP NO. 14 TAHUN 2024, DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA PERHITUNGAN GAJI DAN TUNJANGAN SUDAH TERMASUK DENGAN KEBUTUHAN THR DAN GAJI 13 SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. NAMUN PPPK YANG DIANGKAT LEBIH SEDIKIT DARI YANG DIUSULKAN PADA APBD AWAL

DEMIKIANLAH TANGGAPAN YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN ATAS PANDANGAN UMUM YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL.

SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN YANG TERHORMAT.

TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLKAR DAPAT KAMI SAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT:

1. TERKAIT PANDANGAN FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA YANG PRIHATIN DAN

MENGANGGAP TERJADI PENURUNAN KUALITAS DARI NOTA PENGANTAR GUBERNUR, KAMI MENGHARGAI PENDAPAT TERSEBUT. HAL INI AKAN MENJADI PERHATIAN KAMI UNTUK TERUS BERBENAH DI MASA YANG AKAN DATANG.

2. SELANJUTNYA KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA FRAKSI PARTAI GOLKAR YANG TELAH MENINGATKAN BAHWA TAHUN 2024 INI ADALAH MERUPAKAN TAHUN TERAKHIR DARI RPJPD PROVINSI SUMATERA BARAT 2020-2024. KARENA ITU KAMI SEPAKAT UNTUK MENJADIKAN PERUBAHAN APBD INI SEBAGAI MOMENTUM UNTUK MEMASTIKAN KETERCAPAIAN TARGET KINERJA SETIAP INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH YANG MELEKAT PADA SETIAP SKPD.
3. TERHADAP SARAN AGAR SKPD YANG DIBEBAHKAN PENAMBAHAN TARGET PAD AGAR MENDAPAT PENAMBAHAN BELANJA ATAU SEBALIKNYA, SECARA PRINSIP KAMI SANGAT SETUJU. SELANJUTNYA KAMI BERHARAP SKENARIO PENAMBAHAN DAN/ATAU PENGURANGAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG TELAH DIRANCANG SEDEMIKIAN RUPA OLEH TAPD DAPAT KITA BAHAS DAN

SETUJUI BERSAMA SESUAI DENGAN KETENTUAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

4. TERHADAP PENAMBAHAN ATAUPUN PENGURANGAN TARGET PAD PADA BEBERAPA SKPD TELAH KAMI JELASKAN SEBELUMNYA PADA JAWABAN ANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERINDRA.
5. SELANJUTNYA MENGENAI KORELASI LAPORAN SEMESTER PERTAMA PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 DENGAN RANPERDA PERUBAHAN APBD, MENURUT PERSPEKTIF KAMI HAL TERSEBUT MEMILIKI RELEVANSI YANG SANGAT KUAT. KAMI MENDUKUNG SARAN FRAKSI PARTAI GOLKAR AGAR SKPD YANG MEMILIKI REALISASI RENDAH SEBAGIAN ANGGARANNYA DIREKOLASI KE SKPD YANG BERKINERJA TINGGI. NAMUN PERLU DIINGAT BAHWA KEBIJAKAN RELOKASI INI, TETAP MENJALANKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN KECERMATAN SESUAI KETENTUAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. SELANJUTNYA KAMI MOHON DUKUNGAN DARI SELURUH ANGGOTA DPRD UNTUK SAMA-SAMA

MENGAWALNYA SEHINGGA DI AKHIR TAHUN REALISASI APBD KITA TETAP BERKINERJA BAIK DAN SILPA YANG TERBENTUK BERADA DALAM RASIO YANG WAJAR.

DEMIKIANLAH TANGGAPAN YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN ATAS PANDANGAN UMUM YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI PARTAI GOLKAR.

SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN YANG TERHORMAT.

MENJAWAB PANAFANGAN UMUM FRAKSI PARTAI PPP-NASDEM, DAPAT KAMI SAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT:

1. MENANGGAPI PERMINTA PENJELASAN TENTANG PENYUSUNAN RANPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN 2024 AGAR MENGACU KEPADA KUA-PPAS PERUBAHAN TAHUN 2024 YANG TELAH DISEPAKATI, DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT MEMPUNYAI TUJUAN YANG SAMA DENGAN FRAKSI PPP-NASDEM BAHWA DALAM PENYUSUNAN RANPERDA PERUBAHAN APBD

TAHUN 2024 MENGACU KEPADA PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS TA 2024, DAN TELAH TELAH MEMPEDOMANI PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH YANG TELAH DITETAPKAN DALAM RPJMD.

2. MENGENAI OPTIMALISASI PENERIMAAN DAERAH DAPAT DIJELASKAN SEBAGAI BERIKUT :

- a. DENGAN SISA WAKTU YANG ADA TINDAKAN PEMERINTAH PROVINSI UNTUK MEMAKSIMALKAN UPAYA PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI, SUDAH TERJAWAB PADA JAWABAN PERTANYAAN YANG IDENTIK PADA FRAKSI GERINDRA.
- b. MENGENAI POTENSI DARI IDLE ASET YANG BISA DIMANFAATKAN JUGA SUDAH TERJAWAB DENGAN JAWABAN PERTANYAAN PADA FRAKSI PARTAI GERINDRA
- c. UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENDAYAGUNAKAN OPD PENGELOLA BLUD DAN UPTD-UPTD LAINNYA DALAM RANGKA AKSELERASI PENERIMAAN DAERAH ANTARA LAIN DENGAN MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGALI POTENSI

PENDAPATAN MELALUI KERJASAMA DENGAN SEKTOR SWASTA DAN LAYANAN TAMBAHAN, SERTA PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI KEUANGAN YANG TERINTEGRASI.

- d. PERIHAL DEFISIT YANG CUKUP BESAR PADA PERUBAHAN APBD TAHUN 2024, AKAN MENJADI PEMBELAJARAN BAGI KITA SEMUA AGAR TIDAK TERJADI LAGI PADA MASA-MASA MENDATANG. DALAM MENGATASI DEFISIT YANG CUKUP BESAR INI, PEMPROV TELAH MELAKUKUAN RASIONALISASI BELANJA-BELANJA PADA SKPD DAN AKAN TERUS MENGOPTIMALKAN PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN TAHUN 2024.
3. SELANJUTNYA MENGENAI KEBUTUHAN MASYARAKAT PASAMAN DAN PASAMAN BARAT TERHADAP PENGUATAN TEBING BATANG AMPU DI PASAMAN ABARAT DAN PENGUATAN TEBING BATANG LANDIR DI PASAMAN, DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA PEMBANGUNAN PENGENDALIAN BANJIR DI SUNGAI BATANG AMPU DI KABUPATEN PASAMAN BARAT DAN BATANG LANDIR KABUPATEN PASAMAN HARUS DILAKUKAN SECARA TERPADU DAN

KOMPRESIF, DIMANA SANGAT DIPERLUKAN DESAIN MENYELURUH DAN DILANJUTKAN PEMBANGUNAN FISIKNYA SECARA BERTAHAP. SELAIN ITU JUGA PERLU PENANGANAN NON FISIK SEPERTI PENGHIJAUAN KEMBALI DAERAH ALIRAN SUNGAI, UNTUK PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR SERTA KONSERVASI SUMBER AIR.

4. SEHUBUNGAN DENGAN MASUKAN AGAR PROYEK YANG DIDANAI DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DIOPTIMALKAN Pengerjaannya dengan tetap memperhatikan kualitas fisiknya, Pemerintah Provinsi Sependapat dan Berterima Kasih karena sudah diingatkan oleh Fraksi PPP-NASDEM.
5. MENGENAI TANGGAPAN FRAKSI PPP-NASDEM TERHADAP PEMERINTAH DAERAH UNTUK SEGERA MELAKSANAKAN KEGIATAN YANG SUDAH DI RENCANAKAN DAN SUDAH DIANGGARKAN PADA APBD MURNI TAHUN 2024, DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA KAMI SETUJU DENGAN HAL TERSEBUT DIANTARANYA PERUBAHAN ANGGARAN YANG KITA LAKUKAN INI HANYA BERUPA PENYESUAIAN TERHADAP KONDISI TERKINI YANG SUDAH TIDAK RELEVAN

- LAGI DENGAN KEBIJAKAN UMUM APBD YANG SEBELUMNYA KITA SEPAKATI.
6. TERHADAP PERMINTAAN FRAKSI PPP-NASDEM AGAR PEMERINTAH DAERAH PADA APBD PERUBAHAN TIDAK MENGANGGARKAN KEGIATAN FISIK DAN BELANJA MODAL YANG SIFATNYA DITENDERKAN MENINGAT WAKTU YANG SANGAT SINGKAT, KAMI SEPENDAPAT, DISAMPING ITU HAL INI JUGA TELAH DIAMANATKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
 7. PERMINTAAN FRAKSI NASDEM AGAR GUBERNUR MEMERINTAHKAN KETUA TAPD UNTUK MEMAKSIMALKAN PENDAPATAN DAERAH DAN MENYISIR/ MENUNDA KEGIATAN-KEGIATAN OPD YANG TIDAK URGEN, SUDAH DILAKUKAN SAAT MENCARIKAN SOLUSI TERHADAP TINGGINYA DEFISIT PADA PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024 INI, SELANJUTNYA PEMERINTAH DAERAH AKAN BERUPAYA UNTUK MENCAPAI TERGET PENDAPATAN YANG TELAH DISEPAKATI PADA SAAT PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS SEBAGAIMANA YANG TELAH KAMI JELASKAN PADA POIN DIATAS.

8. SEHUBUNGAN DENGAN SARAN FRAKSI PPP-NASDEM AGAR ANGGARAN DIARAHKAN UNTUK MENAMBAH SARANA PRASARANA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN, KAMI SANGAT SEPAKAT KARENA PENDIDIKAN MERUPAKAN BAGIAN VITAL DARI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENINGKATAN SARANA PRASARANA SATUAN PENDIDIKAN AKAN MENINGKATKAN AKSES PENDIDIKAN DAN BERIMBAS PADA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN. NAMUN TENTU KITA TIDAK BISA MENGENYAMPINGKAN KUALITAS GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN YANG MENDUKUNG PEMENUHAN KOMPETENSI SISWA MENUJU INDONESIA EMAS TAHUN 2024
9. KAMI BERTERIMA KASIH DAN MENGAPRESIASI PERSETUJUAN DARI FRAKSI PPP-NASDEM TERKAIT RANCANGAN PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA SEBAGAIMANA YANG TELAH DIAJUKAN PADA RANPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD TA. 2024.
10. SEHUBUNGAN DENGAN PERNYATAAN FRAKSI PARTAI PPP-NASDEM MENGENAI RANPERDA

PERUBAHAN APBD TAHUN 2024, YANG DIPANDANG MASIH BELUM BERPIHAK KEPADA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DAN PENGURANGAN ANGKA PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN SEHINGGA PERLU LEBIH DISEMPURNAKAN, KAMI SEPAKAT DAN BERTERIMA KASIH ATAS MASUKAN YANG DIBERIKAN. UNTUK ITU MOHON DALAM PEMBAHARAN RANPERDA PERUBAHAN APBD NANTINYA HAL INI SAMA-SAM MENJADI FOKUS PERHATIAN KITA.

11. MENGENAI STANDARISASI, EFEKTIVITAS DAN HARAPAN DARI PROGRAM UNGGULAN (PROGUL) AGAR TERLAKSANA DENGAN BAIK, SEHINGGA KEBERADAAN PROGRAM TERSEBUT BISA DIRASAKAN MASYARAKAT BANYAK, DALAM HAL INI KAMI SEPENDAPAT DAN BERMohon DUKUNGAN DARI FRAKSI PPP-NASDEM DAN SELURUH FRAKSI LAINNYA AGAR KITA BERSAMA DAPAT MENGAWAL PROSES PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN PROGUL-PROGUL TERSEBUT SEHINGGA BENAR-BENAR DAPAT DIRASAKAN DAN MENINGKATKAN

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SUMATERA BARAT.

12. PERMASALAH YANG TERJADI PADA MASYARAKAT TERKAIT PUKAT HARIMAU ATAU HAMPARAN DASAR, YANG MASIH BEROPERASI DI BEBERAPA WILAYAH DI PESISIR SELATAN, DAPAT DIJELASKAN SEBAGAI BERIKUT :

- a. PADA TAHUN 2024 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT MELALUI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SUDAH MELAKUKAN 5 KALI PENGAWASAN.
- b. SELANJUTNYA JUGA DILAKUKAN PENGAWASAN DENGAN MELIBATKAN UNSUR PENGAWAS DKP, POLAIRUT DAN SATWAS PSDKP, YANG DILAKUKAN MELALUI DARAT DAN PATROL LAUT.
- c. SELANJUTNYA KE DEPAN AKAN DILAKUKAN LANGKAH-LANGKAH:
 - 1) MENINGKATKAN INTENSITAS PENGAWASAN
 - 2) BERKOORDINASI DENGAN LANTAMAL II PADANG

3) MENDIRIKAN POS PENGAWASAN
ANGKATAN LAUT DI LOKASI YANG
SERING TERJADI PELANGGARAN

4) MENGUPAYAKAN PERCEPATAN
PENANDATANGAN PERJANJIAN
KERJASAMA PENGAWASAN ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN PERIKANAN
RI DENGAN PEMDA PROVINSI
SUMATERA BARAT.

13. MENGENAI PENYEDIAAN AMBULANCE LAUT DI
TUA PEJAT MENTAWAI PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT MELALUI DINAS
KESEHATAN TELAH MENGUSULKAN
AMBULANCE AIR PADA ANGGARAN DAK 2024,
NAMUN DITOLAK DENGAN ALASAN UNTUK
AMBULANCE AIR MEMBUTUHKAN ANGGARAN
OPERASIONAL DAN MAINTENANCE YANG
BESAR. PADA TAHUN 2013, KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI TELAH
MENDAPATKAN BANTUAN AMBULANCE AIR,
NAMUN SAAT INI TIDAK BISA DIFUNGSIKAN

DAN TERBENGKALAI KARENA KETERBATASAN
ANGGARAN OPERASIONAL DAN
MAINTENANCE.

DEMIKIANLAH TANGGAPAN YANG DAPAT KAMI
SAMPAIKAN ATAS PANDANGAN UMUM YANG
DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI PARTAI PPP NASDEM.

***SAUDARA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN SERTA
HADIRIN YANG TERHORMAT.***

TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI
DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DAN PKB,
DAPAT KAMI SAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT:

1. TERKAIT PERTANYAAN HAL APA YANG MEMBUAT
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATEA
BARAT BEGITU OPTIMISNYA SEKTOR
PENDAPATAN INI DAPAT DINAIKAN DALAM
KONDISI PEREKONOMIAN MASYARAKAT YANG
MASIH LEMAH INI, DAPAT DIJELASKAN BAHWA
PENINGKATAN PENDAPATAN MENJADI SEBESAR
RP6,877 TRILYUN ATAU MENINGKAT 4,42 % DARI
APBD AWAL YAITU RP6,586 TRILYUN INSYAAALAH
BISA KITA CAPAI DENGAN MEMPERHATIKAN

PERTUMBUHAN EKONOMI SUMATERA BARAT YANG TERUS MENGALAMI PENINGKATAN. ASUMSI LAIN YANG MENDUKUNG HAL TERSEBUT ANTARA LAIN:

- a. INFLASI SUMATERA BARAT YANG TERKENDALI.
- b. DAYA BELI MASYARAKAT SUMATERA BARAT YANG MULAI MEMBAIK.
- c. STABILITAS POLITIK DAN EKONOMI YANG MASIH TERKENDALI.
- d. ADANYA KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT MELALUI STIMULUS PAJAK BAGI MASYARAKAT SUMATERA BARAT.

MUDAH-MUDAHAN DENGAN KERJA KERAS SEMUA PIHAK MAKA ROYEKSI PENDAPATAN YANG DIRENCANAKAN PADA PERUBAHAN APBD TAHUN 2024 OPTIMIS DAPAT DICAPAI.

2. TERHADAP LAPORAN SEMESTER PADA KONDISI PENDAPATAN DAERAH YANG BARU TERCAPI SEKITAR 43,25% YANG MENYEBABKAN KEKHAWATIRAN FRAKSI PDIP-PKB ATAS

KETERCAPAIAN KENAIKANMYA SEBESAR 4,42% DI PERUBAHAN APBD 2024, DAPAT DIJELASKAN BAHWA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TELAH MENGHITUNG SECARA CERMAT POTENSI PENDAPATAN. KEMUDIAN LANGKAH-LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- a. MENGOPTIMALKAN KINERJA SAMSAT;
- b. MENGOPTIMALKAN LAYANAN RETRIBUSI JASA UMUM, JASA USAHA DAN PERIZINAN TERTENTU DENGAN MENGIMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI;
- c. MENINGKATKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA SEMUA BUMD SEHINGGA DAPAT MENINGKATKAN JUMLAH DEVIDEN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT;
- d. MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN ASET-ASET YANG MASIH IDLE.

3. TERHADAP PERTANYAAN APA PENYEBAB LAMBATNYA REALISASI BELANJA DAERAH, DAPAT DIJELASKAN BAHWA SERAPAN

ANGGARAN YANG MASIH DIBAWAH 50% TERSEBUT SEJALAN DENGAN UPAYA MEMAKSIMALKAN PENDAPATAN DAERAH DAN MENYISIR/ MENUNDA KEGIATAN-KEGIATAN OPD YANG TIDAK URGEN KHUSUSNYA PADA BELANJA BARANG DAN JASA. BELUM OPTIMALNYA SERAPAN ANGGARAN TERSEBUT KAMI PASTIKAN TIDAK AKAN BERDAMPAK SIGNIFIKAN TERHADAP PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT, KARENA PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT TETAP MENJADI PRIORITAS UTAMA PEMERINTAH PROVINSI, SEMENTARA EFISIENSI BELANJA DITUJUKAN KEPADA HAL-HAL YANG BERADA DI LUAR ITU.

ADAPUN LANGKAH KONKRIT YANG AKAN DILAKSANAKAN ANTARA LAIN :

- a. MEMFORMASI ULANG PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA MELAKUKAN PENYESUAIAN RENCANA BELANJA JIKA DIPERLUKAN.
- b. MELAKUKAN PENGENDALIAN PENCEGAHAN PEMBOROSAN DAN MEMASTIKAN EFISIENSI BELANJA.

- c. MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SECARA BERKALA TERHADAP KINERJA SKPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMBAR.

DEMIKIANLAH TANGGAPAN YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN ATAS PANDANGAN UMUM YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA.

III. PENUTUP

DEMIKIANLAH YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN SEBAGAI JAWABAN ATAS PANDANGAN, PERTANYAAN, SARAN DAN TANGGAPAN DARI PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD. SESUAI DENGAN MEKANISME, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN 2024 YANG TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA HARI KAMIS 31 JULI 2024 YANG LALU AKAN MEMASUKI TAHAPAN PEMBAHASAN YANG LEBIH MENDALAM DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN. SEMOGA NIAT BAIK DAN UPAYA KITA INI DAPAT MEMBERIKAN MANFAAT YANG

LEBIH BESAR UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT
SUMATERA BARAT, SERTA MEMPEROLEH RIDHA DAN
BERKAH HENDAKNYA DARI ALLAH SWT.

TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN DAN MOHON MAAF
ATAS SEGALA KEKURANGAN

BILLAHITAUFIK WAL HIDAYAH,
WASSALAMU'ALAIKUM WR.WB

WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT

AUDY JOINALDY



**FRAKSI PDI PERJUANGAN & PKB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



*Jln. Khatib Sulaiman No.87 Telp. (0751)443391,7059325,7059328 Fax.(0751) 443391 -
7059325 Padang 25133*

<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PDI PERJUANGAN DAN PKB
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024**

**Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian**

Merdeka!!!

- **Yang Terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat**
- **Yang Terhormat Saudara Ketua dan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah**
- **Yang Terhormat Sekretaris Dewan Beserta Jajaran**

Hadirin yang kami muliakan,

Terlebih dahulu kami mengucapkan terimakasih atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi PDI Perjuangan dan PKB untuk menyampaikan Pendapat Akhirnya terhadap Ranperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dan sebelum kami menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi ini, se izin pimpinan kami mengajak kita semua untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri dan melaksanakan Rapat Kerja Pembahasan Akhir terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 ini dalam keadaan sehat wal'afiat dan atas rahmat Yang Maha Kuasa kita dapat menyelesaikan tugas-tugas ini dengan baik. Selanjutnya Shalawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan kearwah nabi besar kita Muhammad SAW junjungan alam pembawa perubahan yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju sinar kemajuaan *-minazzulumati ilannur-* sebagaimana yang kita rasakan hari ini serta selalu kita dambakan safaatnya siang dan malam.

Pempinan Serta Hadirin Yang Kami Muliakan,

Sebelum kami membacakan pendapat akhir Fraksi kami ini terlebih dahulu kami menyampaikan ucapan untuk HUT RI ke- 79 : ***“Merdeka Bukan Hanya Kata, Melainkan Tekad Untuk Terus Berkarya. Selamat Ulang Tahun Ke-79, Indonesia! Mari Terus Maju”***

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dilakukan karena terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA yang ditetapkan, baik dalam bentuk pelampauan maupun tidak tercapainya target yang ditetapkan, perlu dilakukannya pergeseran anggaran antar organisasi, program dan kegiatan serta terdapat SILPA yang harus digunakan pada tahun berjalan sebagaimana yang dibunyikan pada pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga pada kondisi saat ini kita perlu melakukan perbaikan dalam terutama dalam peningkatan pendapatan daerah untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang telah terencana terutama kegiatan yang menyangkut untuk kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. Fraksi kami berharap kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat bahwa kedepan khususnya terhadap target-target pendapatan, pihak-pihak yang terkait pada posisi ini betu-betul sudah memakai azaz professional dalam mencapai target tersebut. Selanjutnya izinkalah Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menyampaikan pendapat akhirnya sebagai berikut:

1. Pertama-tama ucapan terimakasih Fraksi kami kepada kawan-kawan di Banggar serta TAPD yang telah menyelesaikan Hasil Pembahasan Ranperda Tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
2. Pada tahun 2023 yang lalu dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Fraksi kami pernah menyampaikan bahwa di dalam menghadapi kondisi-kondisi yang sulit seperti sekarang ini diperlukan suatu konektivitas dan transparansi baik itu di dalam tubuh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun hubungan dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat sehingga apa yang terjadi saat ini dapat kita atasi dengan baik dan tidak merugikan kepentingan Pembangunan Sumatera Barat yang kita cintai ini. Fraksi kami sekali lagi mengingatkan hal ini.
3. Sebagaimana dalam laporan Hasil Pembahasan Banggar bersama TAPD bahwa memperhatikan target pendapatan daerah dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran dan TAPD, tidak sesuai dengan target yang diusulkan dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024,

maka perlu dilakukan rasionalisasi alokasi belanja yang akan ditampung nanti dalam Perubahan APBD Tahun 2024, agar terdapat keseimbangan antara pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Terhadap hal ini Fraksi kami memberikan pendapat bahwa *kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan dalam pokok-pokok pikiran DPRD Sumatera Barat yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat hendaknya tidak terganggu dalam melakukan rasionalisasi tersebut sebab kegiatan ini sudah memperhitungkan dampak manfaat bagi masyarakat, dan pembangunan provinsi yang kita cintai ini.*

4. Tentang Pendapat Asli Daerah, sebagaimana yang terlihat pada Laporan Banggar bersama TAP bahwa PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah diusahakan dapat ditingkatkan menjadi sebesar Rp. 3.348.283.830.555, (hasil pembahasan kedua) kurang dari target yang ditetapkan dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 dengan segala pertimbangan, Fraksi kami dalam hal ini memberikan pendapat bahwa posisi PAD ini selalu dapat diotak-atik sesuai dengan kebutuhan, kedepan kita berharap bahwa posisi PAD ini sudah harus dapat menempatkan angka-angka/nilai-nilai yang dimunculkan/ditampilkan sudah bersifat realistis.
5. Tentang Target PAD dalam Perubahan APBD Tahun 2024 lebih tinggi dari target PAD dalam Perda APBD Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 230.041.779.655,-, oleh karna itu Fraksi PDI Perjuangan dan PKB meminta kepada Pemerintah Daerah dan OPD-OPD terkait dalam hal pencapaian target tersebut agar bersungguh-sungguh dan berupaya maksimal untuk mewujudkan target Pendapatan tersebut. Fraksi kami juga sepakat dengan Banggar agar tidak terjadi lagi kesalahan seperti di tahun sebelumnya yang mengakibatkan tidak tercapainya target PAD dan sehubungan tahun ini juga telah terjadi beberapa kondisi yang mengakibatkan lambatnya pergerakan pertumbuhan ekonomi di beberapa titik di Sumatera Barat pasca bencana alam, maka Pemerintah Daerah dan OPD-OPD terkait harus mampu berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan insentif-insentif yang dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya serta melakukan kerjasama yang kongkrit dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, agar target-target yang ditetapkan dapat tercapai.

6. Sebagaimana dalam Laporan Banggar Bersama TAPD bahwa alokasi Belanja Daerah yang akan ditampung pada Perubahan APBD Tahun 2024, lebih besar Rp. 199.503.502.031,19,- dari alokasi yang disediakan pada APBD Tahun 2024 awal, dan Terkait dengan alokasi belanja daerah ini,
7. Badan Anggaran memberikan beberapa catatan diantaranya; *Melaksanakan secara keseluruhan kegiatan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRD, oleh karena itu merupakan usulan dan aspirasi Masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan oleh setiap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada konstituennya di akhir masa jabatannya*, Fraksi PDI Perjuangan dan PKB sangat setuju serta meminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama OPD terkait untuk lebih bersungguh-sungguh merealisasikan kegiatan dan anggaran yang telah disediakan pada Perubahan APBD Tahun 2024 ini, agar realisasinya dapat lebih maksimal sampai akhir tahun anggaran 2024 dan mencapai target kinerja dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah.
8. Tentang Pembiayaan Daerah yang bersumber pada Silpa APBD Tahun 2024 sebelumnya sebesar Rp 180.447.544.425,7 dan pengeluaran sebesar Rp. 20.000.000,- tambahan penyertaan modal pada PT Bank Nagari Fraksi kami dapat menerimanya.
9. Terkait Perubahan APBD tahun 2024 yang diantaranya diakibatkan karena lambatnya penyerapan anggaran oleh OPD, lambatnya pelaksanaan kegiatan fisik dimana seringkali ditemukan kegiatan perencanaan dilakukan dalam tahun berjalan dan bermuara pada kualitas Pembangunan yang tidak maksimal oleh karna itu Fraksi PDI Perjuangan dan PKB meminta Pemerintah Daerah Prov. Sumatera Barat untuk memperhatikan sistem keuangan yang baik di sisa tahun anggaran ini kedepannya, dan Fraksi kami juga meminta agar Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan OPD terkait melakukan perencanaan DED pada anggaran perubahan sehingga bisa memaksimalkan kegiatan fisik serta penyerapan anggaran di awal tahun.
10. Fraksi PDI Perjuangan dan PKB mendorong semangat tertib administrasi keuangan untuk selalu dijalankan sehingga keuangan daerah dapat diselamatkan, supaya rasionalisasi belanja pegawai dan belanja barang & jasa dipertimbangkan dan diharapkan opini wajar

tanpa pengecualian, tetapi tanpa adanya banyak temuan kepada Pemerintah Daerah dan OPD Terkait dalam penggunaan/pelaksanaan APBD Perubahan Tahun 2024 hingga akhir tahun anggaran

Rapat Dewan Yang Kami Muliakan,

Sebagaimana yang kami sampaikan di atas yang merupakan Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan dan PKB dengan berbagai harapan, catatan-catatan, saran bahkan kritikan dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat maka dengan ini Fraksi PDI Perjuangan dan PKB ***menyatakan dapat menyetujui*** Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan dan PKB DPRD Provinsi Sumatera Barat pada rapat ini. Akhirnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Sekian dan terimakasih.

*Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq
Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Padang, 19 Agustus 2024

**PIMPINAN FRAKSI
PDI PERJUANGAN DAN PKB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Albert Hendra Lukman, S.E
Ketua

Firdaus, SH.I
Sekretaris



**FRAKSI PDI PERJUANGAN & PKB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



*Jln. Khatib Sulaiman No.87 Telp. (0751)443391,7059325,7059328 Fax.(0751) 443391 -
7059325 Padang 25133*

<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PDI PERJUANGAN DAN PKB
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024**

**Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian**

Merdeka!!!

- **Yang Terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat**
- **Yang Terhormat Saudara Ketua dan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah**
- **Yang Terhormat Sekretaris Dewan Beserta Jajaran**

Hadirin yang kami muliakan,

Terlebih dahulu kami mengucapkan terimakasih atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi PDI Perjuangan dan PKB untuk menyampaikan Pendapat Akhirnya terhadap Ranperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dan sebelum kami menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi ini, se izin pimpinan kami mengajak kita semua untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri dan melaksanakan Rapat Kerja Pembahasan Akhir terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 ini dalam keadaan sehat wal'afiat dan atas rahmat Yang Maha Kuasa kita dapat menyelesaikan tugas-tugas ini dengan baik. Selanjutnya Shalawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan kearwah nabi besar kita Muhammad SAW junjungan alam pembawa perubahan yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju sinar kemajuaan *-minazzulumati ilannur-* sebagaimana yang kita rasakan hari ini serta selalu kita dambakan safaatnya siang dan malam.

Pemimpin Serta Hadirin Yang Kami Muliakan,

Sebelum kami membacakan pendapat akhir Fraksi kami ini terlebih dahulu kami menyampaikan ucapan untuk HUT RI ke- 79 : ***“Merdeka Bukan Hanya Kata, Melainkan Tekad Untuk Terus Berkarya. Selamat Ulang Tahun Ke-79, Indonesia! Mari Terus Maju”***

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dilakukan karena terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA yang ditetapkan, baik dalam bentuk pelampauan maupun tidak tercapainya target yang ditetapkan, perlu dilakukannya pergeseran anggaran antar organisasi, program dan kegiatan serta terdapat SILPA yang harus digunakan pada tahun berjalan sebagaimana yang dibunyikan pada pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga pada kondisi saat ini kita perlu melakukan perbaikan dalam terutama dalam peningkatan pendapatan daerah untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang telah terencana terutama kegiatan yang menyangkut untuk kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. Fraksi kami berharap kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat bahwa kedepan khususnya terhadap target-target pendapatan, pihak-pihak yang terkait pada posisi ini betu-betul sudah memakai azas professional dalam mencapai target tersebut. Selanjutnya izinkalah Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menyampaikan pendapat akhirnya sebagai berikut:

1. Pertama-tama ucapan terimakasih Fraksi kami kepada kawan-kawan di Banggar serta TAPD yang telah menyelesaikan Hasil Pembahasan Ranperda Tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
2. Pada tahun 2023 yang lalu dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Fraksi kami pernah menyampaikan bahwa di dalam menghadapi kondisi-kondisi yang sulit seperti sekarang ini diperlukan suatu konektivitas dan transparansi baik itu di dalam tubuh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun hubungan dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat sehingga apa yang terjadi saat ini dapat kita atasi dengan baik dan tidak merugikan kepentingan Pembangunan Sumatera Barat yang kita cintai ini. Fraksi kami sekali lagi mengingatkan hal ini.
3. Sebagaimana dalam laporan Hasil Pembahasan Banggar bersama TAPD bahwa memperhatikan target pendapatan daerah dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran dan TAPD, tidak sesuai dengan target yang diusulkan dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024,

maka perlu dilakukan rasionalisasi alokasi belanja yang akan ditampung nanti dalam Perubahan APBD Tahun 2024, agar terdapat keseimbangan antara pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Terhadap hal ini Fraksi kami memberikan pendapat bahwa *kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan dalam pokok-pokok pikiran DPRD Sumatera Barat yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat hendaknya tidak terganggu dalam melakukan rasionalisasi tersebut sebab kegiatan ini sudah memperhitungkan dampak manfaat bagi masyarakat. dan pembangunan provinsi yang kita cintai ini.*

4. Tentang Pendapat Asli Daerah, sebagaimana yang terlihat pada Laporan Banggar bersama TAP bahwa PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah diusahakan dapat ditingkatkan menjadi sebesar Rp. 3.348.283.830.555, (hasil pembahasan kedua) kurang dari target yang ditetapkan dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 dengan segala pertimbangan, Fraksi kami dalam hal ini memberikan pendapat bahwa posisi PAD ini selalu dapat diotak-atik sesuai dengan kebutuhan, kedepan kita berharap bahwa posisi PAD ini sudah harus dapat menempatkan angka-angka/nilai-nilai yang dimunculkan/ditampilkan sudah bersifat realistis.
5. Tentang Target PAD dalam Perubahan APBD Tahun 2024 lebih tinggi dari target PAD dalam Perda APBD Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 230.041.779.655,-, oleh karna itu Fraksi PDI Perjuangan dan PKB meminta kepada Pemerintah Daerah dan OPD-OPD terkait dalam hal pencapaian target tersebut agar bersungguh-sungguh dan berupaya maksimal untuk mewujudkan target Pendapatan tersebut. Fraksi kami juga sepakat dengan Banggar agar tidak terjadi lagi kesalahan seperti di tahun sebelumnya yang mengakibatkan tidak tercapainya target PAD dan sehubungan tahun ini juga telah terjadi beberapa kondisi yang mengakibatkan lambatnya pergerakan pertumbuhan ekonomi di beberapa titik di Sumatera Barat pasca bencana alam, maka Pemerintah Daerah dan OPD-OPD terkait harus mampu berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan insentif-insentif yang dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya serta melakukan kerjasama yang kongkrit dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, agar target-target yang ditetapkan dapat tercapai.

6. Sebagaimana dalam Laporan Banggar Bersama TAPD bahwa alokasi Belanja Daerah yang akan ditampung pada Perubahan APBD Tahun 2024, lebih besar Rp. 199.503.502.031,19,- dari alokasi yang disediakan pada APBD Tahun 2024 awal, dan Terkait dengan alokasi belanja daerah ini,
7. Badan Anggaran memberikan beberapa catatan diantaranya; *Melaksanakan secara keseluruhan kegiatan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRD, oleh karena itu merupakan usulan dan aspirasi Masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan oleh setiap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada konstituennya di akhir masa jabatannya*, Fraksi PDI Perjuangan dan PKB sangat setuju serta meminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama OPD terkait untuk lebih bersungguh-sungguh merealisasikan kegiatan dan anggaran yang telah disediakan pada Perubahan APBD Tahun 2024 ini, agar realisasinya dapat lebih maksimal sampai akhir tahun anggaran 2024 dan mencapai target kinerja dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah.
8. Tentang Pembiayaan Daerah yang bersumber pada Silpa APBD Tahun 2024 sebelumnya sebesar Rp 180.447.544.425,7 dan pengeluaran sebesar Rp. 20.000.000,- tambahan penyertaan modal pada PT Bank Nagari Fraksi kami dapat menerimanya.
9. Terkait Perubahan APBD tahun 2024 yang diantaranya diakibatkan karena lambatnya penyerapan anggaran oleh OPD, lambatnya pelaksanaan kegiatan fisik dimana seringkali ditemukan kegiatan perencanaan dilakukan dalam tahun berjalan dan bermuara pada kualitas Pembangunan yang tidak maksimal oleh karna itu Fraksi PDI Perjuangan dan PKB meminta Pemerintah Daerah Prov. Sumatera Barat untuk memperhatikan sistem keuangan yang baik di sisa tahun anggaran ini kedepannya, dan Fraksi kami juga meminta agar Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan OPD terkait melakukan perencanaan DED pada anggaran perubahan sehingga bisa memaksimalkan kegiatan fisik serta penyerapan anggaran di awal tahun.
10. Fraksi PDI Perjuangan dan PKB mendorong semangat tertib administrasi keuangan untuk selalu dijalankan sehingga keuangan daerah dapat diselamatkan, supaya rasionalisasi belanja pegawai dan belanja barang & jasa dipertimbangkan dan diharapkan opini wajar

tanpa pengecualian, tetapi tanpa adanya banyak temuan kepada Pemerintah Daerah dan OPD Terkait dalam penggunaan/pelaksanaan APBD Perubahan Tahun 2024 hingga akhir tahun anggaran

Rapat Dewan Yang Kami Muliakan,

Sebagaimana yang kami sampaikan di atas yang merupakan Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan dan PKB dengan berbagai harapan, catatan-catatan, saran bahkan kritikan dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat maka dengan ini Fraksi PDI Perjuangan dan PKB ***menyatakan dapat menyetujui*** Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan dan PKB DPRD Provinsi Sumatera Barat pada rapat ini. Akhirnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Sekian dan terimakasih.

*Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq
Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Padang, 19 Agustus 2024

**PIMPINAN FRAKSI
PDI PERJUANGAN DAN PKB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Albert Hendra Lukman, S.E
Ketua

Firdaus, SH.I
Sekretaris